



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan lima tahun daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012-2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Landak.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui skala prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

Sistematika dari RPJMD memuat :

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV. ANALISIS ISU –ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI. STRATEGI ADAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI. PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2012-2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan, Penetapan Indikator Kinerja Daerah, Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- b. tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program.
- (3) Evaluasi RPJMD dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 19 November 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012- 2016

I. UMUM

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diamanahkan bahwa setiap pemerintah Daerah menyusun dokumen RPJMD.

RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra SKPD/Instansi lingkungan Perda.

Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun tahapan tersebut adalah :

- a. pembahasan pada tingkat Tim Teknis Kabupaten;
- b. konsultasi Publik tingkat Kecamatan;
- c. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten.

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika antara lain Ketentuan Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Input adalah masukan – masukan berupa SDM, SDA, Dana, serta Program Pusat, Provinsi dan Daerah.
Output merupakan produk akhir dari suatu proses kegiatan/Input.
Hasil (Outcome) merupakan manfaat yang diperoleh dari *Output*/produk yang dihasilkan.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, dampak dan keberlanjutan program.

- Efisiensi adalah: merupakan perbandingan antara Input dan Output, semakin besar Output dibanding Input sekunder, maka semakin efisien pelaksanaan RPJMD.
- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program kegiatan
- Dampak adalah : rencana program kegiatan yang sudah direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kelompok sasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2012-2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 - 2016

DAFTAR ISI

	<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
	<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
	<i>Daftar Gambar</i>	<i>vi</i>
	<i>Daftar Tabel</i>	<i>vii</i>
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Landasan Hukum.....	3
	1.4. Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	6
	1.4.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Landak 2007 -	6
	2027.....	
	1.4.2 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Landak 2012 -	6
	2032.....	
	1.4.3 RPJMD dengan Renstra SKPD Kabupaten	6
	Landak.....	
	1.4.4 RPJMD dengan RKPD Kabupaten Landak.....	7
	1.5 Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
	2.1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	11
	2.1.1 Posisi Geografis dan Wilayah Administrasi	11
	2.1.2 Penduduk.....	14
	2.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan.....	18
	2.1.4 Hidrologi dan Irigási.....	19
	2.1.5 Iklim.....	20
	2.1.6 Geologi dan Jenis Tanah.....	23
	2.1.7 Daerah Rawan Bencana.....	27
	2.1.8 Kawasan Hutan.....	31
	2.1.9 Pertambangan.....	33
	2.1.10 Pariwisata.....	34
	2.1.11 Penggunaan Lahan.....	36
	2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	38
	2.2.1 Angka Melek Hurup.....	38
	2.2.2 Seni Budaya dan Olah Raga.....	39
	2.3. Kondisi Pelayanan Umum.....	40
	2.3.1 Pendidikan.....	41
	2.3.2 Kesehatan.....	44
	2.3.3 Jalan dan Jembatan.....	45
	2.3.4 Listrik.....	46
	2.3.5 Air Bersih.....	47
	2.3.6 Keluarga Berencana.....	48
	2.3.7 Sosial.....	49

	2.3.8	Pariwisata.....	51
	2.3.9	Kehidupan Beragama.....	52
2.4		Daya Saing Daerah.....	53
	2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah.....	53
	2.4.2	Infrastruktur.....	67
	2.4.3	Iklim Berinvestasi.....	69
	2.4.4	Sumber Daya Manusia.....	71
BAB III.		GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA	
		PENDANAAN.....	73
	3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	73
		3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	73
		3.1.2 Neraca Daerah.....	77
	3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	80
		3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	80
		3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	82
	3.3.	Kerangka Pendanaan.....	84
		3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta	
		Prioritas Utama.....	84
		3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu.....	86
		3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	89
BAB IV.		ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	94
	4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	95
		4.1.1 Analisa Lingkungan Eksternal.....	95
		4.1.2 Analisa Lingkungan Internal.....	96
	4.2.	Isu Strategis Daerah.....	97
BAB V.		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	99
	5.1.	Visi	99
	5.2.	Misi.....	99
	5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	100
BAB VI.		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	112
	6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	112
		Pertama.....	
	6.2	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	113
		Kedua.....	
	6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	115
		Ketiga.....	
	6.4.	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	116
		Keempat.....	
	6..5.	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	117
		Kelima.....	
	6.6.	Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi	118
		Keenam.....	
BAB VII.		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	120
	7.1.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Pertama.....	120
	7.2.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kedua	123
	7.3.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Ketiga.....	126
	7.4.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keempat.....	130
	7.5.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kelima.....	131
	7.6.	Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam.....	132
BAB VIII.		INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN	
		PENDANAAN.....	136

BAB IX.	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	137
BAB X.	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJDAH PELAKSANAAN.....	138
	10.1 Pedoman Transisi.....	138
	10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	139
BAB XI.	PENUTUP.....	142
Lampiran I	Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016.	
Lampiran II	Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Hubungan RPJMD Dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
Gambar. 1.2	Hubungan RPJMD Dan Proses Penganggaran.....	9
Gambar. 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Landak.....	13
Gambar. 2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Landak Tahun 2010.....	15
Gambar. 2.3	Penggunaan lahan Di Kabupaten Landak.....	37
Gambar. 2.4	Proporsi Penggunaan Lahan Di Kabupaten Landak Tahun 2009.....	37
Gambar. 2.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan...	57
Gambar. 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak Dan Prov Kalbar Tahun 2006-2010.....	58
Gambar. 2.7	Sumber Dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	61
Gambar. 2.8	Struktur Ekonomi Kabupaten Landak Tahun 2010.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel . 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Landak Per Kecamatan.....	12
Tabel . 2.2	Nama Kecamatan,Ibukota Kecamatan,Luas Areal Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Landak	13
Tabel .2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel .2.4	Penduduk Menurut Kecamatan,Jenis Kelamin Kabupaten Landak Tahun 2010.....	15
Tabel .2.5	Kepadatan Penduduk Per KM2 Kabupaten Landak Tahun 2010	16
Tabel .2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	17
Tabel .2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	17
Tabel .2.8	Kemiringan Lahan Di Kabupaten Landak.....	19
Tabel .2.9	Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Tahun 2000 – 2009.....	21
Tabel .2.10	Kecepatan Angin Dan Suhu Udara Tahun 2000 – 2009.....	22
Tabel .2.11	Prosentase Penyinaran Matahari Per Hari Per Tahun 2000-2009.	22
Tabel .2.12	Struktur Geologi Di Kabupaten Landak.....	24
Tabel.2.13	Jenis Tanah Di Kabupaten Landak.....	26
Tabel.2.14	Kawasan Hutan Lindung.....	32
Tabel.2.15	Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Landak Tahun 2009.....	33
Tabel.2.16	Penyebaran Potensi Bahan Tambang Di Kabupaten Landak.....	34
Tabel.2.17	Obyek Wisata Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	35
Tabel.2.18	Penggunaan Lahan Di Kabupaten Landak Tahun 2009.....	36
Tabel.2.19	Indikator Pendidikan Kabupaten Landak.....	38
Tabel.2.20	Perkembangan Seni, Budaya Dan Olah Raga Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	40
Tabel.2.21	Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Landak	40
Tabel.2.22	Banyaknya Sekolah Di Bawah Lingkungan Diknas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010.....	42
Tabel.2.23	Prosentase Partisipasi Sekolah Menurut Jenis kelamin Dan Usia Sekolah Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	43
Tabel.2.24	Banyaknya Murid,Guru SD Dan Rasio Murid Terhadap Guru Di Bawah Lingkungan Diknas Tahun 2010.....	43
Tabel.2.25	Statistik Kesehatan Kabupaten Landak	45
Tabel.2.26	Pajang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dan Status Jalan Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	46
Tabel.2.27	Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Ranting/Unit Dan Golongan Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	47
Tabel.2.28	Banyaknay Pelanggan Dan Penyaluran Air Minum Menurut Jenis Pelanggan Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	48
Tabel.2.29	Jumlah Peserta KB Aktif Metode Konstrasepsi Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	49
Tabel .2.30	Penderita Cacat Di Kabupaten Landak Tahun 2010.....	50
Tabel. 2.31	Banyaknya Penduduk Lanjut Usia Dan Anak Terlantar Tahun 2010.....	50
Tabel. 2.32	Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2011.....	51
Tabel. 2.33	Jumlah Sarana Tempat Ibadah Menurut Status/Fungsi Di Kabupaten Landak Tahun 2009.....	53
Tabel. 2.34	Jenis Produk Pertanian.....	55
Tabel .2.35	Produksi Hasil Pertanian , Perkebunan dan Peternakan.....	55
Tabel. 2.36	Nilai PRDP Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Landak Tahun 2009 – 2010.....	56

Tabel .2.37	Indeks Harga Implisit Dan Laju Inflasi Kabupaten Landak Dan Prov Kalbar Tahun 2006 – 2010.....	64
Tabel. 2.38	Location Quotient(LQ) Kabupaten Landak Terhadap Prov Kalbar Tahun 2010.....	65
Tabel. 2.39	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2010.....	66
Tabel. 2.40	Panjang Ruas Jalan Menurut Status Jalan Di Kabupaten Landak Tahun 2009.....	68
Tabel. 2.41	Angka Kriminallitas Kabupaten Landak Tahun 2009.....	70
Tabel. 2.42	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	71
Tabel. 3.1	Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Landak	74
Tabel. 3.2	Rata- Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 Kabupaten Landak	77
Tabel. 3.3	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Landak	79
Tabel. 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pembangunan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Landak.....	81
Tabel. 3.5	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Landak.....	82
Tabel. 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Landak.....	83
Tabel. 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Kabupaten Landak.....	83
Tabel. 3.8	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Landak	85
Tabel. 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	86
Tabel. 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Landak.....	90
Tabel. 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Landak Tahun 2012-2016.....	1-31
Tabel .9.1	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Landak.....	1 - 8

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Landak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Landak, yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2011. RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016, yaitu “Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing”

Penyelenggaraan pembangunan Landak periode Tahun 2007-2011 telah menghasilkan beberapa kemajuan, namun masih menyisakan permasalahan yang harus diselesaikan pada periode ke depan dan harus menghadapi tantangan global yang semakin berat seperti perubahan iklim serta krisis energi dan pangan. Pada tahapan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 diarahkan untuk lebih meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Mandiri dan Terdepan Secara Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Industri, Pembangunan Transportasi, Pelestarian Lingkungan dan Budaya serta Tatakelola Pemerintahan Yang Baik. Pada periode Bupati/Wakil Bupati Landak ini pembangunan ditekankan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur, percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta peningkatan partisipatif aktif masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Landak dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2007-2027, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Landak.

RPJMD Kabupaten Landak juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Landak secara berjenjang.

2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

- a. menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Landak ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Landak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Landak, APBN dan sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- e. menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

3. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - l. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - t. Peraturan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - u. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M

PPN/04/2010, No. PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Landak

RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2006-2011. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Landak masa bakti tahun 2011-2016, juga berpedoman pada visi, misi, dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2007-2027.

b. RPJMD dan RTRW Kabupaten Landak

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Landak sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Landak.

c. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Landak.

d. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Landak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Landak yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

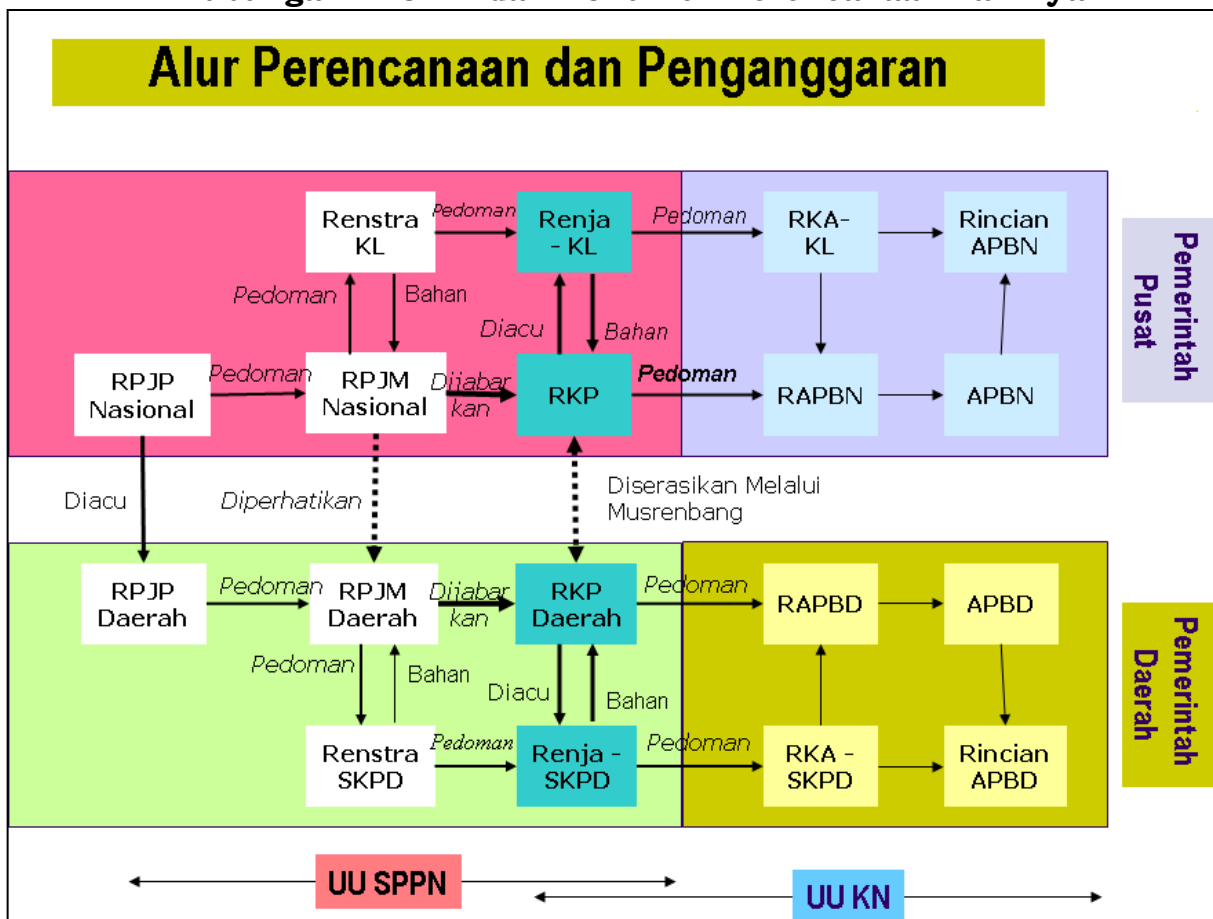
5. KERANGKA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN

5.1. Kerangka Pikir

Penyusunan RPJMD diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 ini adalah sebagai berikut:

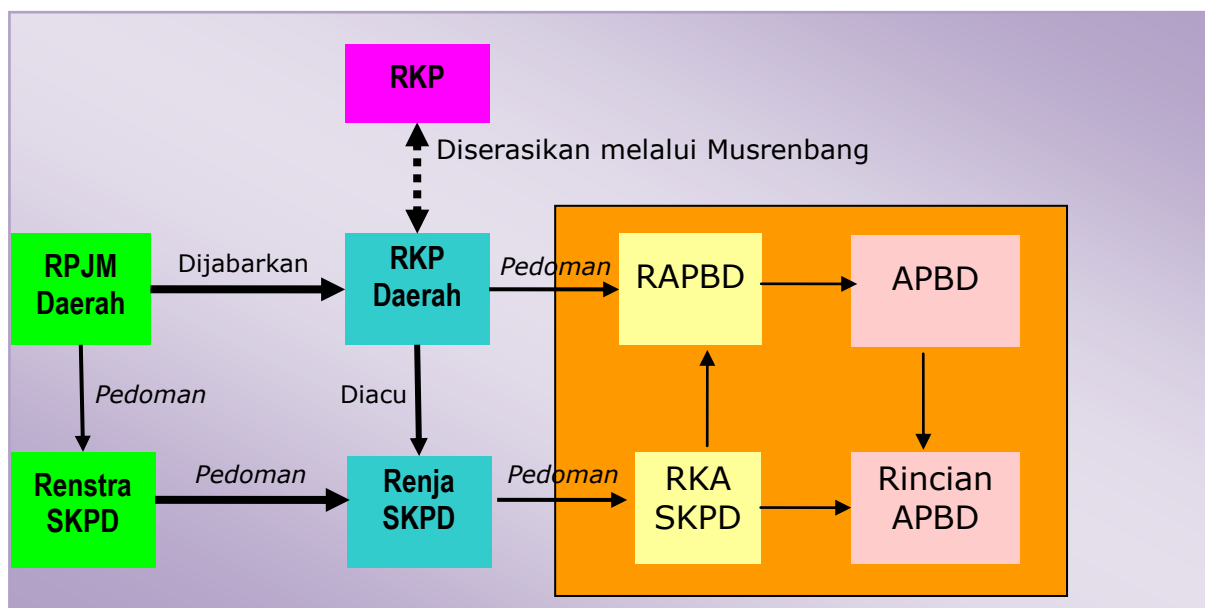
Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



Alur Pikir integrasi RPJM Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :

Gambar .1.2
Hubungan RPJMD dan Proses Penganggaran



5.2 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB. 1 PENDAHULUAN
- BAB. 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB. 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB. 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB. 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB. 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB. 7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB. 8 RENCANA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB. 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB.10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB.11 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Staablاد nomor 50 tahun 1926 jo Staablاد nomor 186 tahun 1938 menetapkan pembagian wilayah Kalimantan Barat menjadi 12 daerah swapraja dan 3 neo swapraja. Salah satu dari 12 daerah swapraja itu adalah Swapraja Landak.

Dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri nomor PEM 20/6/10 tanggal 8 September 1951 dilakukan pembagian wilayah administratif baru, dan Kalbar waktu itu berdasar surat tersebut dibagi dalam 6 kabupaten administratif dan satu kota administratif.

Dalam tahun 1962 sebagaimana juga swapraja lainnya di Kalbar, pemerintahan Swapraja Landak ikut dihapus dan mulai saat itu bekas wilayah kekuasaan administratifnya dihimpun ke dalam Kabupaten Pontianak.

Mulanya ibukota Kabupaten Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak. Pada tahun 1963, dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 51/1/9-11 tanggal 5 Februari 1963, maka ibukota dialihkan ke Mempawah. Sebelum ditetapkannya Mempawah, ada dua alternatif untuk dijadikan ibukota Kabupaten Pontianak waktu itu, yakni Mempawah dan Ngabang.

Kemudian karena luasnya wilayah administratif Kabupaten Pontianak, guna mempermudah jangkauan pembinaan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, didasarkan Keputusan Mendagri Nomor 821.26-224 tanggal 13 Maret 1985, ditetapkan Organisasi Pembantu Bupati Wilayah Ngabang yang berkedudukan di Ngabang. Pembantu Bupati Wilayah Ngabang ini terdiri dari Kecamatan Ngabang, Air Besar, Sengah Temila dan Menyuke.

Kemudian dilakukan pemekaran wilayah otonom dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak yang beribukota Ngabang. Kabupaten Landak membawahi 10 kecamatan, 149 desa dan 528 dusun.

Secara administratif, Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat hasil pemekaran/pecahan dari Kabupaten Pontianak, sejak tahun 1999 yang beribukota di Ngabang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 dan Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 183 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak didasarkan pada perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemanfaatan moment dan peluang otonomi daerah untuk Kabupaten Landak dilakukan dengan menyusun berbagai program dan rencana

pembangunan serta kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Di dalam mendukung upaya meningkatkan kondisi dimaksud, Kabupaten Landak memiliki potensi yang memadai. Potensi-potensi dimaksud berupa potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi letak geografis yang apabila didayagunakan secara optimal akan memiliki nilai tambah yang sangat diperlukan sebagai sumber daya pembangunan.

2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1. Posisi Geografis dan Wilayah Administrasi

Mulai tahun 2007, Kabupaten Landak terdiri atas 13 Kecamatan (sebelum dimekarkan, terdiri 10 Kecamatan) dan 156 Desa serta 553 Dusun. Kabupaten Landak terletak pada koordinat 1°00" LU - 0°52' LS dan 109°10'42" - 110°10' BT. Secara administratif batas Kabupaten Landak adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sanggau ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sanggau dan Kubu Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak.

Apabila dicermati, letak Kabupaten Landak sangat strategis. Dikatakan sangat strategis karena kabupaten ini terletak di tengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat, juga merupakan daerah lintasan jalur Pontianak – Entikong – Kuching – Brunei Darussalam maupun jalur Pontianak – Jagoibabang – Kuching. Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di sepanjang jalur tersebut. Letak demikian ini merupakan salah satu potensi dan modal bagi pengembangan Kabupaten Landak di masa mendatang.

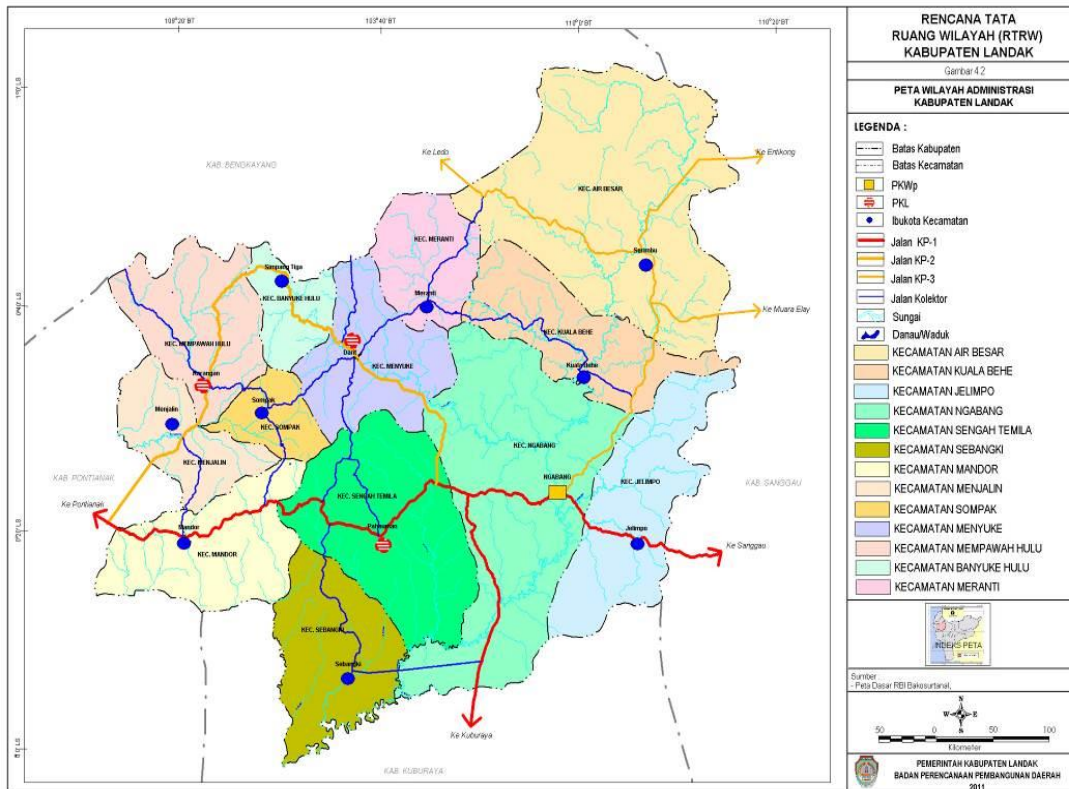
Luas wilayah Kabupaten Landak secara keseluruhan 9.909,10 Km² atau setara dengan 6,75 % luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rincian luas wilayah per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Landak Per Kecamatan

No	Kecamatan	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran, 2007	
		Luas (Km ²)	%	Luas (Km ²)	%
1	Sebangki	885.60	8.94	885.60	8.94
2	Sengah Temila	1,963.00	19.81	1,963.00	19.81
3	Mandor	455.10	4.59	455.10	4.59
4	Menjalin	322.90	3.26	322.90	3.26
5	Meranti	372.34	3.76	372.34	3.76
6	Kuala Behe	968.00	9.77	968.00	9.77
7	Air Besar	1,361.20	13.74	1,361.20	13.74
8	Ngabang	1,996.90	20.15	1,153.10	11.64
9	Jelimpo	0	0.00	843.80	8.52
10	Menyuke	867.96	8.76	597.44	6.03
11	Banyuke Hulu	0	0.00	270.52	2.73
12	Mempawah Hulu	716.10	7.23	496.34	5.01
13	Sompak	0	0.00	219.76	2.22
	Jumlah	9,909.10	100.00	9,909.10	100.00

Sumber : Bappeda dan BPS Kab. Landak

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Landak
Sumber : Bappeda Kab. Landak, 2007



Tabel 2.2.
Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Area dan Jumlah Desa di Kabupaten Landak

No	Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas Area (Km2)	Jml Dusun	Jml Desa
1	Sebangki	Sebangki	885,60	27	5
2	Ngabang	Ngabang	1.996,90	74	19
3	Sengah Temila	Pahauman	1.963,00	69	14
4	Mandor	Mandor	455,10	56	17
5	Menjalin	Menjalin	322,90	26	8
6	Mempawah Hulu	Karangan	716,10	52	17
7	Menyuke	Darit	867,96	71	16
8	Meranti	Meranti	372,34	25	6
9	Kuala Behe	Kuala Behe	968,00	28	11
10	Air Besar	Serimbu	1.361,20	34	16
11	Jelimpo	Jelimpo	843,80	43	13
12	Sompak	Sompak	219,76	21	7
13	Banyuke Hulu	Simpang Tiga	270,52	29	7
Jumlah			9.909,10	555	156

Sumber: Bappeda, 2008

2.1.2. Penduduk

Mayoritas penduduk di Kabupaten Landak adalah suku Dayak. Dikatakan demikian karena ada bukti konkritnya yaitu masih adanya peninggalan rumah Panjang/Batang di Kabupaten Landak sampai saat ini, tepatnya terletak di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila. Selain Suku Dayak, Kabupaten Landak juga dihuni oleh Suku Melayu, Tionghoa, Madura dan etnis lainnya. Kecamatan Sebangki, lebih separuh penduduknya suku Madura. Mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Landak yaitu sektor pertanian.

Jumlah penduduk di Kabupaten Landak cenderung fluktuasi, dan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk sebanyak 347.933 orang, pada tahun 2010 menjadi sebanyak 342.626 orang.

Tabel: 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2007	181.400	166.533	347.933
2	2008	178.320	163.841	342.161
3	2009	183.595	168.172	351.767
4	2010	179.134	164.429	342.626

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Landak

Jumlah penduduk tahun 2010 di Kabupaten Landak adalah 342.626 jiwa. Jumlah ini terdiri dari laki-laki 179.134 (52,13%) dan perempuan 164.492 jiwa (47,87%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4.
**Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin
Kabupaten Landak Tahun 2010**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngabang	39.166	32.532	67.698
2	Sengah Temila	28.979	26.685	55.659
3	Mandor	15.462	14.592	30.054
4	Menjalin	9.504	8.747	18.251
5	Mempawah Hulu	17.890	16.322	34.302
6	Menyuke	14.632	13.331	27.963
7	Meranti	4.472	4.066	8.538
8	Kuala Bahe	7.970	7.230	15.200
9	Air Besar	10.460	9.231	19.691
10	Sebangki	7.694	7.262	14.956
11	Jelimpo	13.711	12.602	26.313
12	Sompak	6.722	6.202	12.924
13	Banyuke Hulu	6.387	5.690	12.077
	Jumlah	179.134	164.492	343.626

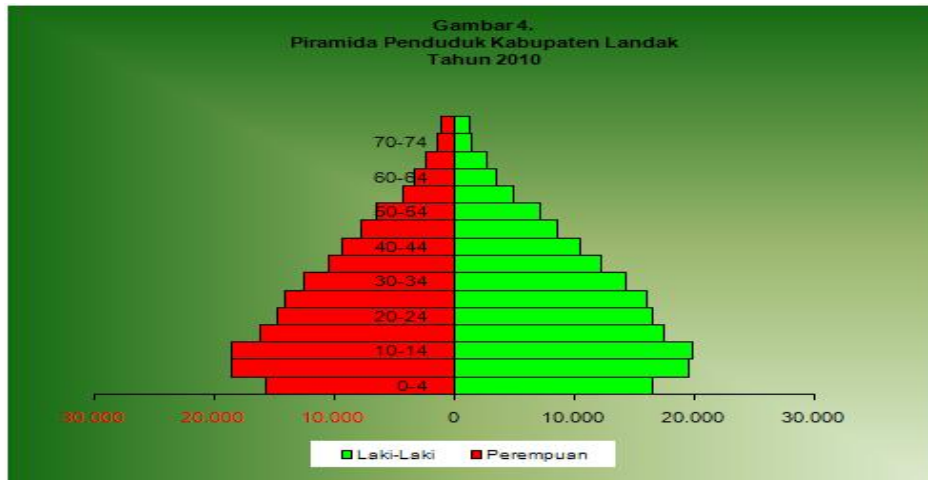
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Landak

Berdasarkan data tahun 2010 di atas, terlihat bahwa penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Ngabang sebanyak 67.698 jiwa, yang meru-

pakan ibukota Kabupaten Landak. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Banyuke Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 8.538 jiwa.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Landak sebesar 343,626 jiwa selama kurun waktu tahun 2000 - 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,92 % per tahun.

Gambar 2.2.
Piramida Penduduk Kabupaten Landak
Tahun 2010



Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Mempawah Hulu dengan tingkat kepadatan rata-rata 66 penduduk per Km² dan kepadatan penduduk yang terkecil di Kecamatan Kuala Behe dengan tingkat kepadatan rata-rata 14 penduduk per Km². Jumlah penduduk usia kerja bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk per Km² Kabupaten Landak Tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Sebangki	16.730	885,60	19
2	Ngabang	60.583	1.148,10	53
3	Sengah Temila	53.493	1.963,00	27
4	Mandor	28.387	455,10	62
5	Menjalin	18.598	322,90	58
6	Mempawah Hulu	32.782	498,30	66
7	Menyuke	25.716	594,20	43
8	Meranti	9.080	372,30	24
9	Kuala Bahe	13.650	968,00	14
10	Air Besar	21.924	1.361,20	16
11	Sompak	13.581	219,80	62
12	Jelimpo	23.338	848,80	27
13	Banyuke Hulu	11.864	273,80	43
	Jumlah	329.649	9.909,10	33

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Landak relatif bervariasi dengan rata-rata kepadatan Kabupaten Landak sebesar 33 penduduk per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Mempawah Hulu dengan 66 penduduk per kilometer persegi dan

kepadatan terendah berada di Kecamatan Kuala Behe dengan 14 penduduk per kilometer persegi.

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia di Kabupaten Landak pada tahun 2010, terbanyak adalah usia 20 tahun sampai dengan 24 tahun sebanyak 39.363 jiwa atau 11,46% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Landak. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di atas usia 75 tahun sebanyak 4.599 jiwa atau 1,34% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Landak, berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
0 - 4	28.784
5 - 9	36.850
10 - 14	37.451
15 - 19	35.607
20 - 24	39.369
25 - 29	35.084
30 - 34	30.148
35 - 39	23.767
40 - 44	20.879
45 - 49	16.238
50 - 59	14.582
60 - 64	8.742
65 - 69	6.504
70 - 74	4.599
> 75	5.022
Jumlah	343.626

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan dalam Tabel 2.7. di bawah. Jumlah penduduk yang terbanyak adalah yang berstatus belum/tidak bekerja sebanyak 87.792 jiwa atau 35,55% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Landak. Kemudian diikuti oleh jenis pekerjaan sebagai petani/pekebun sebanyak 88.610 jiwa atau 25,20% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Landak.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
Belum/Tidak Bekerja	87.792	Nelayan/Perikanan	90
Mengurus Rumah Tangga	50.510	Industri	20
Pelajar/Mahasiswa	68.678	Konstruksi	173
Pensiunan	624	Transportasi	80
Pegawai Negeri Sipil	5.101	Karyawan Swasta	9.480
TNI	623	Karyawan BUMN	865
Kepolisian RI	414	Karyawan BUMD	49
Pedagang	801	Honoror	473
Petani/Perkebunan	88.610	Buruh Harian Lepas	1.600
Peternak	45	Buruh Tani/Perkebunan	4.971
Buruh Nelayan/Perikanan	31	Penata Rias	13
Buruh Peternakan	57	Panata Rambut	20
Pembantu RT	804	Mekanik	96
Tukang Cukur	46	Seniman	8
Tukang Listrik	20	Tabib	12
Tukang Batu	14	Perajin	8

Tukang Kayu	245	Penterjemah	4
Tukang Sol Sepatu	3	Imam Masjid	18
Tukang Las/Pandai Besi	87	Pendeta	388
Tukang Jahit	38	Pastor	23
Tukang Gigi	1	Wartawam	16
Ustadz/Mubalig	20	Penyiar Radio	1
Juru Masak	9	Pelaut	6
Promotor Acara	-	Peneliti	6
Anggota DPD	1	Sopir	237
Anggota BPK	-	Pialang	6
Walikota	-	Paranormal	6
Anggota DPRD Propinsi	3	Pedagang	455
Anggota DPRD Kab/Kota	35	Perangkat Desa	193
Dosen	21	Kepala Desa	156
Guru	3.248	Biarawati	25
Pengacara	1	Wiraswasta	5.312
Notaris	4	Perawat	137
Arsitek	4	Akuntan	2
Konsultan	9	Apoteker	5
Dokter	24	Lainnya	10.886
Bidan	65		
Jumlah		343.626	

Sumber: Bappeda Kabupaten Landak

2.1.3. Topografi dan Kemiringan Lahan

Kabupaten Landak termasuk dalam wilayah *Dataran Rendah Pegunungan Barat*. Bagian Utara berbukit-bukit, ke selatan merupakan daerah Lembah atau dataran yang memudahkan melakukan kegiatan sosial ekonomi. Dua sub wilayah yang termasuk dalam dataran rendah Pegunungan Barat yakni Sub Wilayah Pegunungan Niut ($\pm 800 \text{ Km}^2$), yang meliputi wilayah Kecamatan Air Besar sebelah utara dan sub wilayah Pegunungan Bawang ($\pm 770 \text{ Km}^2$) meliputi wilayah Kecamatan Mempawah Hulu dan Menyuke.

Kabupaten Landak, berdasarkan pembagian kelas kemiringan lahan, mencirikan daerah tersebut berada pada kemiringan lahan yang berbukit, ini dapat dilihat pada kemiringan lahan yang dominan berada pada kelas kemiringan berbukit 8 - 15 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai kemiringan lahan di Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.8. yang menggambarkan keadaan kemiringan lahan Kabupaten Landak.

Tabel 2.8.

Kemiringan Lahan Di Kabupaten Landak

No	Kemiringan Lereng	Luas	
		Hektar (Ha)	Persen (%)
1	0-8 %	125.290	15
2	8-15 %	444.213	53
3	15-25 %	40.391	5
4	25-40 %	199.651	24
5	>40 %	21.015	3

Sumber : Hasil Kajian Pemetaan Lahan Kabupaten Landak, 2010.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kemiringan lahan 0-8 % persebarannya seluas 125.290 hektar (15 %), sedangkan kemiringan lahan 8-15 % lebih mendominasi dengan seluas 444.213 hektar (53 %), sementara lahan dengan

kemiringan 15-25 % atau lahan bergelombang seluas 40.391 hektar (5 %), kemiringan 25-40 % seluas 199.651 hektar (24 %) dan diatas 40 % seluas 21.015 hektar (3 %) merupakan lahan dengan kondisi perbukitan sampai pegunungan, dari total luas areal Kabupaten Landak. Lahan-lahan berkemiringan 0-15 % cocok digunakan untuk berbagai jenis kegiatan karena berada pada bentuk wilayah datar sampai berombak.

2.1.4.Hidrologi dan Irigasi

Di Kabupaten Landak pada umumnya tekstur dan struktur tanah sangat menunjang untuk air lebih mudah dan cepat dapat di serap tanaman. Di samping itu di wilayah ini telah banyak sungai kecil maupun besar sehingga akan membantu dalam kegiatan pertanian dan perikanan, khususnya di wilayah Kabupaten Landak.

Wilayah Kabupaten Landak termasuk ke dalam DAS Landak di mana Sungai Landak merupakan sungai terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Landak. Sungai lain yang cukup besar adalah Sungai Menyuke, Sungai Mempawah, dan Sungai Mandor. Sungai Landak berperan penting bagi desa-desa yang berada dipinggir sungai tersebut, karena digunakan masyarakat sebagai air untuk mandi, cuci, makan dan minum, sumber penangkapan ikan, dan prasarana angkutan khususnya. Sungai Landak sangat efektif sebagai prasarana transportasi yang menghubungkan Kota Pontianak dengan daerah Kabupaten Landak.

Sungai Landak yang merupakan sungai utama, lebarnya rata-rata 60 meter dengan kedalaman rata-rata 4 meter. Pola aliran dari sungai-sungai tersebut merupakan pola dendritik yang dicirikan dengan aliran menyebar.

Sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Landak merupakan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun, karena itu perlu diamati debit aliran sungainya. Pengamatan yang dilakukan terhadap debit aliran sungai merupakan debit sesaat. Fluktuasi debit yang terjadi akan selalu berubah dan akan dipengaruhi oleh keadaan iklim, sifat fisik DAS dan penutupan lahan. Pada keadaan sifat fisik DAS dan penutupan lahan yang tetap, maka fluktuasi debit sungai terutama dipengaruhi oleh variasi curah hujan. Tindakan manusia berupa kegiatan-kegiatan perkebunan yang merubah pola penutupan lahan akan mempengaruhi fluktuasi debit. Berdasarkan sebaran kelas lereng dan sebaran penutupan lahan dapat diperkirakan koefisien aliran dan debit puncak, sedangkan padatan tersuspensi (TSS) berpengaruh terhadap besarnya kandungan sedimen.

Sungai Landak mempunyai potensi air terjun, karena debit air yang sangat besar dengan kecepatan 0,71 meter/detik maka dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik mikro hidro. Air terjun Melanggar ini memiliki ketinggian 25 meter dan berada dibagian hulu Kota Ngabang, secara geografis posisi air terjun berada pada 0° 51' 23,26" LU dan 108° 16' 16,56" LS.

Kabupaten Landak juga memiliki sumber mata air yang terdapat di daerah Gunung Seha atau kawasan Wisata Gunung Seha dalam Wilayah Kecamatan Sengah Temila, terdapat sejumlah saluran air bersih bersumber dari mata air.

2.1.5.Iklim

1. Curah Hujan Dan Hari Hujan

Data kondisi curah hujan dan jumlah hari hujan secara umum di wilayah Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Tahun 2000 - 2009

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)
1	Januari	320	20
2	Pebruari	228	15
3	Maret	296	19
4	April	252	19
5	Mei	265	20
6	Juni	201	14
7	Juli	180	15
8	Agustus	174	13
9	September	277	17
10	Oktober	370	22
11	Nopember	386	23
12	Desember	343	22
	Jumlah	3.292	218
	Rata-rata	274	18

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Jungkat, Kabupaten Pontianak, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata curah hujan bulanan selama sepuluh tahun dari tahun 2000 s/d 2009 berkisar dari 174-386 mm dan rata-rata hari hujan 13 - 23 hh. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3.292 mm dengan jumlah hari hujan tahunan 218 hh, sedang rata-rata curah hujan bulanan 274 mm dengan rata-rata hari hujan bulanan 18 hh. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 174 mm dengan hari hujan 13 hh, sedang bulan terbasah adalah pada bulan Nopember yaitu 386 mm dengan rata-rata 23 hh.

2. Kecepatan Angin Dan Suhu Udara

Data mengenai kecepatan angin dan suhu udara di wilayah Kabupaten Landak secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Dari data pada tabel di atas juga tampak, bahwa kecepatan angin rata-rata setiap bulannya adalah 3 knots. Rata-rata kecepatan angin maksimum setiap bulannya 13,5 knots. Suhu udara berkisar dari 20,2° C - 32,6° C, dengan suhu udara rata-rata bulanan 26,4° C. Suhu udara maksimum meningkat menjelang bulan-bulan kering, dengan suhu udara tertinggi 32,6° C terjadi pada bulan Juni. Sedangkan suhu udara minimum adalah 20,2° C terjadi pada bulan September.

Tabel 2.10.
Kecepatan Angin dan Suhu Udara Tahun 2000 - 2009

No	Bulan	Kecepatan Angin (knots/jam)		Suhu Udara (°C)		
		Maksimum	Rerata	Maksimum	Minimum	Rerata
1	Januari	16	3	31,3	22,5	25,7

2	Pebruari	12	3	31,0	21,2	26,1
3	Maret	10	2	31,6	21,6	26,1
4	April	22	3	32,6	22,8	26,6
5	Mei	12	2	32,6	23,4	26,9
6	Juni	10	2	32,6	23,1	26,9
7	Juli	12	3	32,8	21,2	26,5
8	Agustus	12	3	32,7	22,0	26,6
9	September	12	3	32,4	20,2	26,2
10	Oktober	10	3	31,8	21,6	26,2
11	Nopember	10	3	31,9	22,6	26,4
12	Desember	24	3	32,1	22,2	26,3
	Rata-rata	13,5	3	32,1	22,1	26,4

Sumber : Stasiun Metereologi dan Geofisika, Jungkat Kabupaten Pontianak, 2010.

3. Penyinaran Matahari Dan Kelembaban Udara

Kondisi penyinaran matahari dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Prosentase Penyinaran Matahari Per Hari Per Tahun 2000 - 2009

No.	Bulan	Penyinaran Matahari (%)	Kelembaban (%)
1	Januari	64	88
2	Pebruari	64	88
3	Maret	45	89
4	April	76	87
5	Mei	59	87
6	Juni	71	86
7	Juli	85	84
8	Agustus	70	85
9	September	31	88
10	Oktober	49	87
11	Nopember	65	89
12	Desember	42	89
Jumlah		721	1.047
Rata-rata		60	87

Sumber : Stasiun Metereologi dan Geofisika, Jungkat Kabupaten Pontianak, 2010.

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penyinaran matahari rata-rata 200 jam per tahun dengan prosentase penyinaran per hari per tahun adalah rata-rata 60 %. Penyinaran matahari tertinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan relatif kering (Juni-Agustus). Penyinaran terendah terjadi pada bulan September rata-rata 31 %. Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Landak, berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson termasuk ke dalam Tipe A ($0 < Q < 0,143$). Klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson ini berdasarkan nilai quotient (Q) rata-rata bulan kering dan rata-rata bulan basah.

2.1.6. Geologi dan Jenis Tanah

1. Geologi

Hasil pemetaan geologi Kalimantan Barat yang dibuat oleh Direktorat Geologi Bandung tahun 1976, menjelaskan bahwa formasi geologi yang tersebar di Wilayah Kabupaten Landak, terdiri dari beberapa formasi, penyebaran formasi geologi di setiap kecamatan, dapat dilihat Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
Struktur Geologi di Kabupaten Landak

No	KECAMATAN	JENIS BATUAN	Km2	%
1	Mempawah Hulu	Intrusif dan Plutonik Asam	345.25	3.48
		Plistosen - Pliosen	255.71	2.58
		Intrusif dan Plutonik Basa	60.38	0.61
2	Sengah Temila	Kwarter	75.03	0.76
		Intrusif dan Plutonik Asam	1,049.22	10.59
		Kapur	45.28	0.46
3	Banyuke Hulu	Intrusif dan Plutonik Basa	120.14	1.21
		Intrusif dan Plutonik Asam	259.64	2.62
		Intrusif dan Plutonik Asam	282.83	2.85
4	Menyuke	Kapur	103.33	1.04
		Plistosen - Pliosen	99.2	1
		Intrusif dan Plutonik Basa	168.4	1.7
5	Sompak	Paleozoik	26.15	0.26
		Intrusif dan Plutonik Asam	299.61	3.02
		Intrusif dan Plutonik Basa	5.11	0.05
6	Menjalin	Kwarter	35.6	0.36
		Intrusif dan Plutonik Asam	57.45	0.58
		Kapur	11.04	0.11
7	Air Besar	Plistosen - Pliosen	177.39	1.79
		Intrusif dan Plutonik Asam	34.45	0.35
		Kapur	387.02	3.91
8	Jelimpo	Plistosen - Pliosen	618.55	6.24
		Premo Karbon Trias Atas	14.43	0.15
		Intrusif dan Plutonik Basa	590.24	5.96
9	Meranti	Intrusif dan Plutonik Basa Menengah	134.89	1.36
		Kwarter	4.12	0.04
		Intrusif dan Plutonik Asam	534.63	5.4
10	Kuala Behe	Kapur	306.36	3.09
		Premo Karbon Trias Atas	13.74	0.14
		Intrusif dan Plutonik Basa	17.08	0.17
11	Mandor	Intrusif dan Plutonik Basa Menengah	15.13	0.15
		Intrusif dan Plutonik Asam	2.41	0.02
		Kapur	221.16	2.23
12	Sebangki	Plistosen - Pliosen	8.89	0.09
		Premo Karbon Trias Atas	66.54	0.67
		Intrusif dan Plutonik Basa	84.46	0.85
13	Ngabang	Intrusif dan Plutonik Asam	132.78	1.34
		Kapur	261.69	2.64
		Plistosen - Pliosen	36.83	0.37
14	Kuala Behe	Intrusif dan Plutonik Basa	5.46	0.06
		Intrusif dan Plutonik Basa Menengah	2.11	0.02
		Paleozoik	2.02	0.02
15	Mandor	Kwarter	50.5	0.51
		Intrusif dan Plutonik Asam	169.07	1.71
		Kapur	6.67	0.07
16	Sebangki	Plistosen - Pliosen	338.42	3.42
		Kwarter	268.37	2.71
		Intrusif dan Plutonik Asam	242.48	2.45
17	Ngabang	Kwarter	151.41	1.53
		Intrusif dan Plutonik Asam	431.76	4.36
		Kapur	977.36	9.86
18	Ngabang	Plistosen - Pliosen	223.69	2.26

2. Jenis Tanah

Ditinjau dari struktur dan jenis tanahnya, Kabupaten Landak memiliki beberapa jenis tanah diantaranya jenis tanah OGH (orgosol, gley dan humus), Aluvial, Podsolot Merah Kuning, Podsol dan Latosol. Adapun untuk jenis tanah PMK (podsolet merah kuning) merupakan jenis tanah yang mendominasi lahan.

Tanah Aluvial

Jenis Tanah Aluvial memiliki warna kelabu sampai kelabu kekuningan dan kecoklatan, sering bergley bertotol kuning, coklat dan merah. Tekstur tanah ini bervariasi dari lempung hingga liat, berlapis debu dan pasir. Lapisan atas jenis tanah ini masih selalu mendapat bahan tambahan yang kadang mengandung zat organik. Umumnya lahan dengan jenis tanah aluvial selalu tetap dalam keadaan basah karena sebagian dipengaruhi oleh genangan air (berkala atau menetap) atau limpahan banjir.

Tanah Organosol/ Gambut, Glei dan Humus (OGH)

Tanah organosol merupakan tanah yang tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan organik setebal paling sedikit 50 cm dan paling sedikit mengandung 30% bahan organik (bila liat) atau 20 % bila pasir. Kepadatan (bulk density) kurang dari 0,6 dan selalu jenuh air. Tanah ini mudah mengerut tak balik, dan bila kering peka terhadap erosi dan mudah terbakar.

Selain itu jenis tanah gambut juga terdapat di DAS, daerah ini jenis tanah gambutnya merupakan gambut tropohemist, troposarpist, dan tropofibrist dengan kedalaman 2-6 meter. Gambut jenis tersebut sangat asam, mempunyai kemampuan pertukaran kation yang tinggi akan tetapi tidak jenuh dan umumnya sangat miskin hara utama maupun minor. Air banjir yang mengandung endapan mineral dan bahan organik segar, dapat menghasilkan nitrogen berkadar sedang dan bahkan tinggi fosfor dan potasium di dalam lapisan permukaan.

Podsolik Merah Kuning

Jenis tanah Podsolik Merah Kuning memiliki perkembangan profil sedang, dengan warna merah sampai kuning, horison argilic, masam, kurus dengan kemampuan pertukaran kation dan kejenuhan basah rendah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang paling dominan.

Podsol

Tanah podsol merupakan tanah bermineral yang mempunyai perkembangan profil dengan tekstur pasir kuarsa, sangat masam dan sangat kurus dengan kemampuan pertukaran kation yang sangat rendah. Tanah podsol terbentuk dari endapan pasir kuarsa dengan tanah disekitarnya bergambut dan masam.

Latosol

Jenis tanah latosol merupakan jenis tanah mineral yang sudah memiliki perkembangan profil. Horison tanah ini terselubung, berwarna coklat, merah hingga kuning dengan tekstur liat dan struktur remah hingga bergumpal lemah konsistensi gembur.

Untuk lebih jelasnya, luasan jenis tanah di Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Jenis Tanah di Kabupaten Landak

No	KECAMATAN	JENIS TANAH	LUAS	
			Km ²	%
1	Mempawah Hulu	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	148.34	1.50
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	514.98	5.20
2	Sengah Temila	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	953.36	9.62
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	26.86	0.27
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	72.47	0.73
		Organosol, Gleihumus (Bahan Aluvial)	231.66	2.34
3	Banyuke Hulu	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	128.40	1.30
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	129.56	1.31
4	Menyuke	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	82.37	0.83
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	434.87	4.39
		Latosol (Batuan Beku)	161.06	1.63
5	Sompak	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	277.46	2.80
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	25.64	0.26
6	Menjalin	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	75.65	0.76
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	198.81	2.01
		Podsolik (Batuan Endapan)	131.63	1.33
7	Air Besar	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	173.90	1.76
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	1600.75	16.16
8	Jelimpo	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	515.82	5.21
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	98.17	0.99
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	276.38	2.79
9	Meranti	Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	225.37	2.27
		Latosol (Batuan Beku)	157.44	1.59
10	Kuala Behe	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	250.64	2.53
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	188.43	1.90
11	Mandor	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	76.60383	0.77
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	146.7956	1.48
		Podsolik (Batuan Endapan)	337.4767	3.41
		Organosol, Gleihumus (Bahan Aluvial)	10.54709	0.11
12	Sebangki	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	25.98753	0.26
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	53.84673	0.54
		Podsolik (Batuan Endapan)	3.32817	0.03
		Organosol, Gleihumus (Bahan Aluvial)	434.0915	4.38
13	Ngabang	Podsolik Merah Kuning (Batuan Endapan)	828.11	8.36
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku dan Endapan)	560.99	5.66
		Podsolik Merah Kuning (Batuan Beku)	240.81	2.43
		Organosol, Gleihumus (Bahan Aluvial)	109.86	1.11
	Jumlah		9909.01	100.00

Sumber : Hasil Pemetaan Peta Jenis Tanah.

2.1.7. Daerah Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Landak dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan.

Keberadaan sungai besar dan kecil di Kabupaten Landak tentu saja memberikan dampak terhadap munculnya beberapa kawasan yang rawan

terhadap genangan dan banjir musiman, terutama pada saat musim hujan berpotensi mengalami genangan banjir disekitar kawasan sungai dan berpotensi tanah longsor pada daerah dengan kemiringan diatas 25 %.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Kalbar, bahwa potensi kebakaran hutan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Landak, pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah pemicu terjadinya kebakaran hutan.

Permasalahan dan potensi rawan bencana tersebut diatas merupakan kendala yang dihadapi Kabupaten Landak, beberapa daerah rawan bencana meliputi :

1. Gerakan Tanah/Longsor

Longsor dapat terjadi pada daerah yang memiliki kemiringan lereng bervariasi. Lereng yang terjal dengan jenis tanahnya mempunyai kandungan pasir banyak akan memudahkan terjadinya longsor. Jenis longsor terdiri dari :

- Debris flow yaitu gerakan tanah yang bergerak mengalir dari satu tempat ke tempat lain;
- Block side yaitu gerakan tanah yang terjadi pada blok masa batuan; dan
- Rock slide yaitu gerakan tanah yang bergerak secara rotasi dari satu tempat ke tempat lain.

Selain longsor, dikenal juga amblesan berupa gerakan tanah yang tak terlihat jelas namun dapat diidentifikasi bila pada suatu lahan terjadi pergeseran bangunan. Misalnya pergeseran tiang listrik ke arah yang lebih miring. Peristiwa tanah longsor biasanya terjadi jika gaya gravitasi melebihi gaya menahan naik karena kekuatan dan kohesi bahan, friksi antara bahan dengan sekitarnya dan unsur penahan. Beberapa faktor inheren adalah keadaan struktur, sifat distribusi mineral dan unsur lain, topografi, kadar air dan kelembaban, serta vegetasi. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Landak dapat di bagi menjadi 3 kelompok yaitu :

a. Zone Potensi Gerakan Tanah Rendah

Wilayah yang mempunyai potensi gerakan tanah rendah memiliki karakteristik fisik antara lain morfologi daratan hingga bergelombang kemiringan lereng 0-15 %, lereng tidak dibentuk oleh gerakan tanah lama, tanah timbunan dan lempung yang mempunyai sifat mengembang. Sebaran daerahnya meliputi sebagian besar Kabupaten Landak.

b. Zone Potensi Gerakan Tanah Sedang

Wilayah yang mempunyai potensi gerakan tanah sedang memiliki karakteristik fisik antara lain morfologi bergelombang hingga berbukit kemiringan lereng 15-25 %, pada zone ini terjadi gerakan tanah berdimensi kecil hingga agak besar, terutama pada daerah yang berbatasan dengan perbukitan, lembah/lereng, dengan tanah pelapukan yang tebal (>90 cm). Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta

erosi yang berat. Dengan penutup lahan berupa vegetasi yang jarang maka potensi gerakan tanah akan meningkat.

c. Zone Potensi Gerakan Tanah Tinggi

Wilayah yang mempunyai potensi gerakan tanah tinggi memiliki karakteristik fisik antara lain morfologi berbukit-bergunung hingga berbukit kemiringan lereng > 25 %, pada zone ini terjadi gerakan tanah berdimensi agak besar, terutama pada daerah yang berbatasan lembah sungai, lereng perbukitan yang dipengaruhi oleh struktur geologi (sesar dan kekar) Gerakan tanah lama dapat mudah aktif kembali terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta erosi yang berat. Sebaran potensi gerakan tanah tinggi antara lain pada kemiringan yang relatif terjal, dengan pemicu intensitas curah hujan yang tinggi, memudahkan terjadinya gerakan tanah.

2. Banjir

Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehingga ketika terjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.

Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang sempadan sungai di Kabupaten Landak.

3. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:

- Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa/gambut;
- Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang;

- Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli;
- Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit;
- Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan; dan
- Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran lain, antara lain:

- Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang;
- Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan; dan
- Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalok, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran. Kawasan persebaran rawan kebakaran hutan terdapat di beberapa titik pada kawasan hutan dan rawa/gambut di Kabupaten Landak.

2.1.8. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK Menhut No.259/2000 tanggal 23 Agustus tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Kalimantan Barat, jenis dan luas kawasan hutan di Kabupaten Landak, mencakup : Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Lindung Gambut, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran kawasan hutan di Kabupaten Landak berdasarkan penggunaannya di tiap-tiap kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.14.

No	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN LINDUNG	Luas (Ha)		PROSEN TERHADAP	
			a	b	Kws. Hutan	Wilayah
1	Mandor	K.HP Peniti Mandor	4650	4650	1.67	0.47
2	Mandor	K. HPT. Sungai Mandor	820	820	0.29	0.08
3	Mandor	K.H.L G. Sangiangan	555	625.86	0.20	0.06
4	Mandor	C.A Mandor	2841	3000	1.02	0.29
5	Sebangki	K.H P Memperigang	3639.237	3640	1.31	0.37
6		K.H L Gunung Jehanang	1021.563	1345	0.37	0.10
7		K.H. L Sungai Landak	1981.066	1880	0.71	0.20
		K.H.L Gambut	6.273,1		2.20	0.63
8		K.H P Sengah Temila	4450.16	4450.16	1.60	0.45
8		<i>K.H P Sengah Temila</i>		27378.85	0.00	0.00
8	Sengah Temila	K.H P Sengah Temila	22928.69	22928.69	8.23	2.31
9		K.H L Gunung Semahung	2798.363	2812	1.00	0.28
10		H.L Gunung Samarabak	838.8713	775	0.30	0.08
11		H.L G. Belakang	677.2168	700	0.24	0.07
12		K.HP G. Belakang Raya	51512.16	51605	18.49	5.20
13	Sompak	H. L Gunung Raya	3898.57	3900	1.40	0.39

Tabel 2.14. Kawasan Hutan Lindung

14	Banyuke Hulu	H. L Gunung Sakeh	6995.536	6155	2.51	0.71
15	Mempawah Hulu	KHL Gunung Pandan – Puloh	9406.525	9500	3.38	0.95
16		H.L Gunung Penjamuran	544.5697	785	0.20	0.05
17	Menyuke	K.HPK Menyuke Behe	16411.81	16200	5.89	1.66
18		K.H Sungai Menyuke	43475.19	43475.19	15.61	4.39
19	Meranti	K.H L Gunung Mensibau	1313.46	1555	0.47	0.13
20	Kuala Behe	K H.L Gunung Sarat	1256.59	1038	0.45	0.13
21	Air Besar	K H.L Gunung Emporo	857.9658	1000	0.31	0.09
22		K.H.L Gunung Caramin	6014.437	6430	2.16	0.61
23		K.HPT. S. Beduai - S. Dangin	4660.33	6875	1.67	0.47
24		K.H.L Gunung Pejapa	9300.049	9560	3.34	0.94
25		K.H.L Gunung Bentuang	1985.763	2300	0.71	0.20
26		T.N C.A.K.H Niut – Perinsen	54590.78	59899	19.60	5.51
27		K.HPT Landak Hulu	11952.92	14300	4.29	1.21
28		K.H L G. Perinsen – Sinja	3057.257	4200	1.10	0.31
29		Jelimpo	K H.L Gunung Sanggau	2199.983	2223.75	0.79
30	K.H P Gunung Sabi		1952.863	1910	0.70	0.20
	J UMLAH		284861	317916.5	100	28.11

Sumber : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Landak, 2008.

Prosentase luas kawasan hutan terhadap luas Wilayah Kabupaten Landak, adalah 28,11 % (278.587,9 ha), yaitu terdiri dari 122.134,6 ha hutan lindung, dan 166.453,4 ha hutan produksi. Jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan pada tahun 2002, lihat tabel 3.35, luas hutan saat ini, telah berkurang 67.490,6 ha atau 10.65 % dari luas hutan pada tahun 2002. Pengurang kawasan hutan lindung dari 160.868,74 ha menjadi 122.134,6, atau berkurang 0,32 % selama enam tahun. Sedangkan kawasan hutan produksi, dari 191.473,6 ha menjadi 25.020,24 ha atau berkurang 13,07 %.

Wilayah kecamatan yang paling banyak terdapat hutan lindung, adalah Kecamatan Air Besar, yaitu 75.806,3 ha atau 67,6 % dari luas kawasan hutan lindung, atau 1,6 % dari luas Kabupaten Landak. Hutan produksi terbanyak, terdapat di Wilayah Kecamatan Sengah Temila, yaitu 74.440,9 ha, atau 44,72 % dari luas hutan produksi, atau 7,51 % dari luas Kabupaten Landak. Untuk lebih jelasnya mengenai luas kawasan hutan berdasarkan statusnya di Kabupaten Landak, dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Landak Tahun 2009

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)
I.	Kawasan Lindung	119.410
1.	Hutan Lindung	54.830
2.	Taman Nasional	59.779
3.	Cagar Alam	2.841
4.	Kawasan Lindung Gambut	1.960
II.	Kawasan Budidaya	171.680
1.	Hutan Produksi	137.850
2.	Hutan Produksi Konversi	16.320
3.	Hutan Produksi Terbatas	17.510
Total		291.090

Sumber : Kabupaten Landak Dalam Angka, 2010

2.1.9. Pertambangan

Kabupaten Landak memiliki beberapa potensi bahan tambang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan untuk mendukung pengembangan wilayah. Adapun penyebaran potensi bahan tambang tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Penyebaran Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Landak

No	BAHAN TAMBANG DAN ENERGI	PENYEBEBARAN POTENSI
		(Wilayah Kecamatan)
1	Emas	Ngabang, Mandor, Menjalin, Kuala Behe, Air Besar
2	Molibdenit	Ngabang, Mandor, Menyuke
3	Arsen	Menyuke
4	Bismuth	Ngabang, Mandor, Menyuke
5	Tembaga	Mandor, Mempawah Hulu
6	Timah Hitam	Ngabang Mandor
7	Timah Putih	Mempawah Hulu
8	Air Raksa	Ngabang, Air Besar
9	Antimoni	Ngabang, Menyuke
10	Kalolin	Mandor
11	Pasir Kuarsa	Ngabang, Sengah Temila, Mandor
12	Granit	Ngabang, Sengah Temila
13	Andesit	Mandor
14	Basalt	Ngabang, Sengah Temila
15	Kecubung	Mandor
16	Agate	Ngabang
17	Intan	Ngabang, Kuala Behe, Air Besar
18	Tawas	Sengah Temila
19	Gambut	Sebangki

Sumber : Hasil Analisis Peta Pertambangan, 2011.

2.1.10. Pariwisata

Pariwisata pada saat ini dapat dijadikan sebagai sektor penggerak perekonomian atau dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika dapat dimanfaatkan dengan benar. Untuk menjadi penggerak perekonomian, sektor pariwisata seharusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi komoditi yang terkelola dengan baik, di Kabupaten Landak terdapat beberapa obyek wisata yang telah teridentifikasi yang berpotensi untuk dikembangkan, sehingga wisata bahari yang belum tergalai masih banyak, adapun lokasi pariwisata di Kabupaten Landak, dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Objek Wisata di Kabupaten Landak Tahun 2010

No	Nama Objek Wisata	Lokasi Desa/Kecamatan	Dari Ngabang Ke Lokasi	Dari Pontianak Ke Lokasi	Sarana Angkutan	Sarana / Prasarana Pendukung	Jenis Objek Wisata
1.	Air Terjun Panga'ak	Desa Antan Rayan Kec. Ngabang	38 km	160 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
2.	Air Terjun Angan Tembawang	Jelimpo Kec. Jelimpo	17 km	194 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
3.	Air Terjun Sentagung	Desa Mungguk Kec. Ngabang	12 km	201 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
4.	Keraton Ismahayana Ngabang	Desa Raja Kec. Ngabang	1 km	179 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Sejarah
5.	Makam Raja Landak	Desa Raja Kec. Ngabang	1,5 km	179 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Sejarah
6.	Air Terjun Banangar	Desa Perbua Kec. Air Besar	78 km	255 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
7.	Air Terjun Remabo	Desa Skendal	67 km	244 km	Mobil/ Sepeda	-	Alam

		Kec. Air Besar			Motor/ Motor Air		
8.	Riam Jambu	Desa Jambu Kec. Air Besar	58 km	232 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
9.	Goa Kelelawar	Desa Engkangin Kec. Air Besar	69 km	246 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
10.	Goa Sanjan	Desa Engkangin Kec. Air Besar	69 km	246 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
11.	Air Terjun Morban	Desa Engkangin Kec. Air Besar	73 km	250 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
12.	Air Terjun Entilis	Desa Merayuh Kec. Air Besar	78 km	255 km	Mobil/ Sepeda Motor/ Motor Air	-	Alam
13.	Air Terjun Trinting	Desa Engkangin Kec. Air Besar	84 km	261 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
14.	Air Terjun Ringin	Desa Sepangah Kec. Air Besar	57 km	234 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
15.	Air Terjun Ampar Ensot	Desa Merayuh Kec. Air Besar	77 km	254 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
16.	Air Terjun Ampar Jawa	Desa Antan Rayan Kec. Ngabang	38 km	160 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
17.	Pagung Banban	Desa Merayuh Kec. Air Besar	76 km	253 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
18.	Danau Niut	Desa Bentiang Kec. Air Besar	218 km	315 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
19.	Air Terjun Badawat	Desa Dange Aji Kec. Air Besar	84 km	274 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
20.	Air Terjun Pemayong	Desa Bentiang Kec. Air Besar	68 km	246 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
21.	Rumah Betang Saham	Desa Saham Kec. Sengah Temila	52 km	151 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Budaya
22.	Riam Sabadak	Desa Keranji Birah sebatih Kec. Sengah Temila	50 km	149 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
23.	Panorama Gunung Sehak	Desa Polo'ant/ Asong KecSengah Temila	46 km	134 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
24.	Riam Solakng	Senakin Kec. Sengah Temila	57 km	158 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam
25.	Makam Juang Mandor	Mandor Kec. Mandor	76 km	146 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Sejarah
26.	Panyugu Ria Sibir	Desa Jarikng Kec. Menyuke	68 km	168 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Budaya
27.	32 Pantak Ria Sibir	Desa Bagak Kec. Menyuke	69 km	169 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Budaya
28.	Bukit Marabukant	Desa Bandal Kec. Banyuke Hulu	65 km	215 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Sejarah
29.	Air TerjunTikalong	Desa Tunang Kec. Mempawah Hulu	144 km	125 km	Mobil/ Sepeda Motor	-	Alam

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Landak, 2010.

2.1.11. Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Landak terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung secara umum dapat didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan. Kawasan Lindung di Kabupaten Landak terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Taman Nasional, Cagar Alam, Gambut dan Resapan Air.

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Landak terdiri dari Hutan Produksi Biasa, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Basah dan Pusat Pengembangan Kota/ Permukiman.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Landak berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari permukiman, sawah irigasi teknis dan non teknis, hutan, padang semak, kebun campuran, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18., Gambar 2.3. dan Gambar 2.4. di bawah ini.

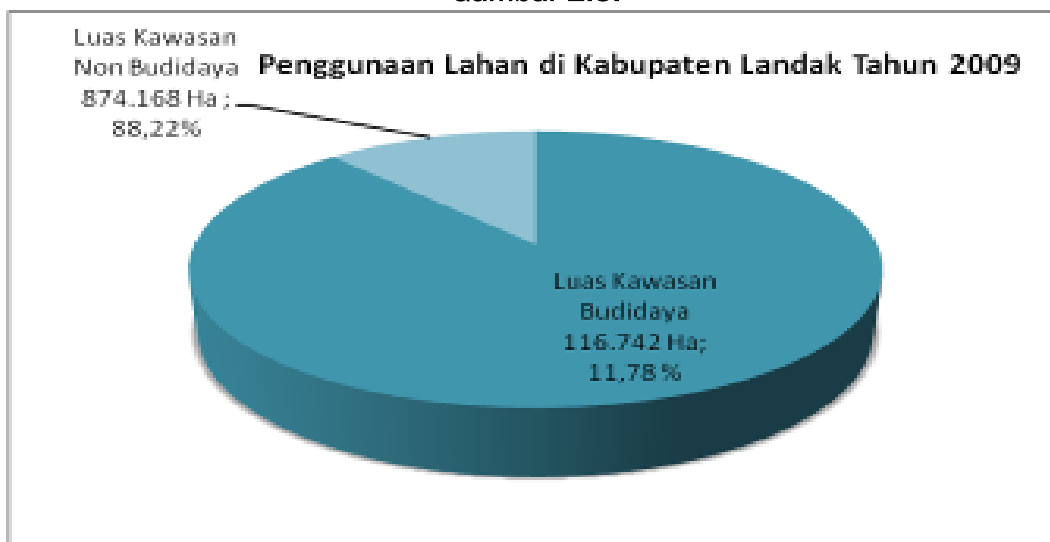
Tabel 2.18.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Landak Tahun 2009

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Permukiman	1.061,17	0,14
Industri	0	0,00
Sawah Irigasi Teknis	1.171,5	0,15
Sawah Irigasi Non Teknis	19.586	2,54
Tanah Kering	22.250,47	2,89
Kebun Campuran	13.115,88	1,70
Perkebunan	6.688,08	0,87
Hutan	221.788	28,77
Padang/ Semak	453.735	58,87
Perairan Darat	25.743	3,34
Tanah Terbuka	5.389	0,70
Lain-Lain	267	0,03

Sumber: Data Base Provinsi Kal Bar 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa penggunaan lahan dominan di Kabupaten Landak adalah padang/semak sebesar 58,87 % atau sebanyak 453.735. Hutan menempati penggunaan lahan tertinggi kedua, yaitu sebesar 28,77 % (221.788 Ha).

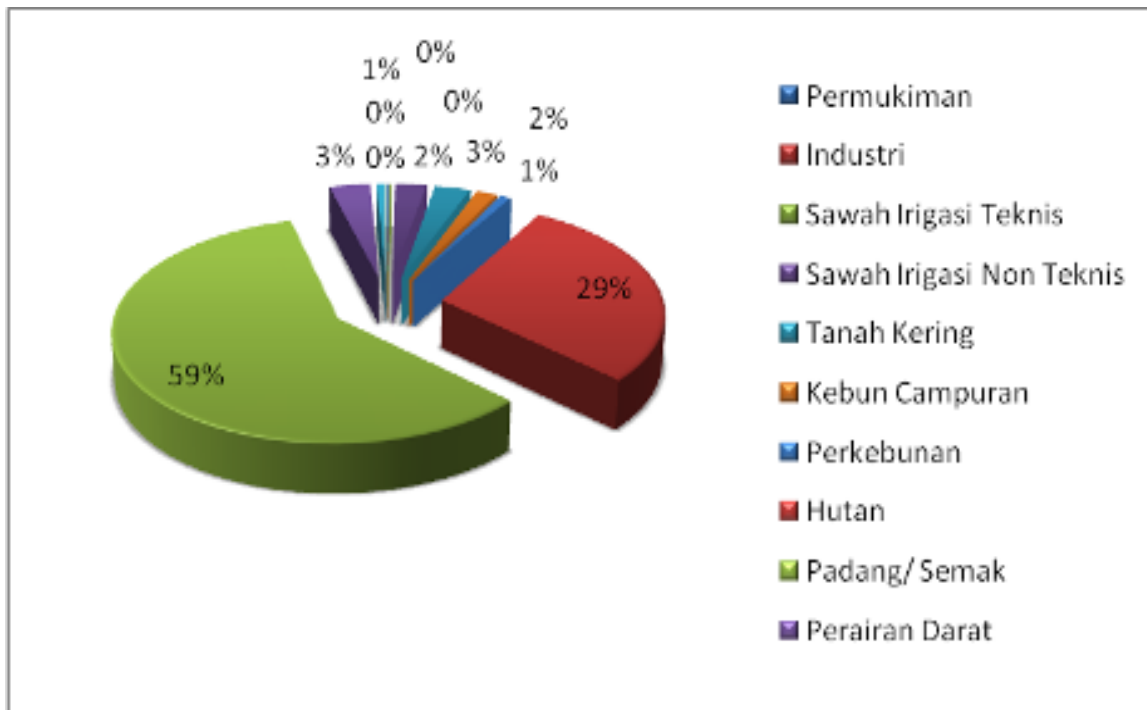
Gambar 2.3.



Sumber: Data Base Provinsi Kal Bar 2009

Gambar 2.4.

Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Landak Tahun 2009



Sumber: Data Base Provinsi Kal Bar 2009

2.2. KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak selama periode 2007-2011 telah meningkatkan cukup baik. Kualitas SDM antara lain ditandai dengan angka melek huruf serta seni budaya dan olah raga.

Indikator keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan mengalami peningkatan terutama angka melek huruf. Upaya pemerintah daerah dalam bidang pendidikan khususnya pemberantasan buta aksara berhasil meningkatkan penduduk melek huruf dari 91,45 persen tahun 2007 menjadi 91,48 persen tahun 2008. Tentu menjadi tantangan Kabupaten Landak untuk 5 tahun ke depan adalah mengejar ketertinggalan dari beberapa kabupaten/kota agar mampu mencapai IPM di atas 75.

2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Kabupaten Landak cenderung terus membaik yaitu 91,48% pada tahun 2009 dari total keseluruhan penduduk. Tingginya angka melek huruf pada masyarakat di Kabupaten Landak terlihat dari indikator rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah kelompok umur antara 7-18 tahun, rasio murid terhadap guru dan angka buta aksara antara umur 15-45 tahun.

Tabel 2.19.
Indikator Pendidikan Kabupaten Landak

INDIKATOR	SATUAN	2007	2008	2009
Angka Melek Huruf	%	91,45	91,45	91,48
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,86	6,86	6,92
Angka Partisipasi Sekolah				
- SD (7-12 Tahun)	%	96,82	97,50	97,80
- SMP (13-15 Tahun)	%	87,05	87,45	81,50
- SMU (16-18 Tahun)	%	55,87	56,46	51,50
Rasio Murid Terhadap Guru				
- SD Negeri	%	25	21	29

- SLTP Negeri	%	10	16	17
- SMU Negeri	%	12	11	16
Angka Buta Aksara	Orang		9.409	7.872

Sumber: Bappeda Landak 2010

2.2.2. Seni Budaya dan Olah Raga

Proses interaksi budaya akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat namun juga menimbulkan pengaruh negatif seperti semakin mudarnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Dengan demikian tantangan lima tahun ke depan yaitu memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur seperti rasa tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat serta nilai keramahan.

Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya global untuk kemajuan bangsa. Tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pembangunan dalam bidang seni dan budaya, pembangunan diarahkan juga pada pembangunan dalam bidang olahraga. Olah raga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang olahraga di Kabupaten Landak selama tahun 2005-2010 telah mencapai kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan olahraga pada periode 2011-2015.

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda di antaranya meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Hal ini ditunjukkan antara lain: (1) meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 35,55 persen pada Tahun 2004 menjadi 59,98 persen pada tahun 2009; (2) menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda dari 4,71 persen pada tahun 2008 menjadi 4,02 persen pada tahun 2009;

Kemajuan pembangunan di bidang olahraga antara lain diperlihatkan dengan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan sesuai data 65 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga di sekolah meningkat dari 60 persen pada tahun 2009 menjadi 75 persen pada tahun 2010.

Tabel 2.20.

**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Di Kabupaten Landak Tahun 2010**

No	Capaian Pembangunan	Jumlah
1	Jumlah Group Kesenian	-
2	Jumlah Gedung Kesenian	-
3	Jumlah Group Olah Raga	-
4	Jumlah Lapangan Olah Raga	62

2.3. KONDISI PELAYANAN UMUM

Membaiknya taraf pendidikan penduduk dan derajat kesehatan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat Kabupaten Landak. Hal ini terlihat dari indikator-indikator makro social ekonomi Kabupaten Landak pada tahun 2007-2009 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-ketahun.

Tabel 2.21.
Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Landak

INDIKATOR	SATUAN	2007	2008	2009
Jumlah Penduduk	Jiwa	321.575	327.712	331.171
Penduduk Miskin	%	24,95	18,65	15,48
Penduduk Miskin	Jiwa	86.300	66.000	55.830
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,72	64,98	65,22
Angka Melek Huruf	%	91,45	91,45	91,48
HDI/IPM	-	66,43	66,74	67,21
PDRB (Harga Konstan 2000)	Milyar Rp	1.397,28	1.457,21	1.525,25
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,13	4,29	3,27
Pengangguran	Jiwa	5.388	6.198	7.171

Sumber: Bappeda Landak 2010

IPM Kabupaten Landak mengalami peningkatan dari 66,43 pada tahun 2007 menjadi 67,21 pada tahun 2009. Berdasarkan kategorinya IPM Kabupaten Landak termasuk dalam kelompok sedang (51-79) yang berarti pemerintah daerah sudah memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sejak tahun 2006-2011 dalam bidang pelayanan umum diprioritaskan pada urusan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Sedangkan urusan pelayanan lainnya berupa pengembangan pertanian, pembinaan keagamaan, kependudukan dan catatan sipil, kegiatan sosial dan pariwisata.

2.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan pelayanan wajib yang dilakukan pemerintah Kabupaten Landak. Pendidikan merupakan program prioritas 5 tahun yang lalu. Dengan pendidikan diharapkan terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Berbagai upaya pemerintah maupun pihak swasta di bidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga guru, hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan kehidupan bangsa.

Data pendidikan ini meliputi data sekolah di bawah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Jumlah sekolah di bawah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak tahun 2010 meliputi TK negeri 3 buah, swasta sebanyak 15 buah, SD Negeri sebanyak 417 buah, SD swasta sebanyak 13 buah, SLTP Negeri sebanyak 52 buah, SLTP swasta sebanyak 48 buah, SMU Negeri sebanyak 18 buah, SMU swasta sebanyak 22 buah, SMK negeri 4 buah dan SMK swasta sebanyak 4 buah. Selain itu terdapat 14 buah Madrasah Ibtida'iyah swasta, 3 buah Madrasah Ibtida'iyah Negeri, 9 buah Madrasah Tsanawiyah swasta, 1 buah Madrasah Tsanawiyah negeri, 1 buah Madrasah Aliyah negeri dan 4 buah Madrasah Aliyah swasta. Secara rinci data jumlah sekolah di Kabupaten Landak disajikan dalam Tabel 2.22. berikut:

Tabel 2.22.
Banyaknya Sekolah Di Bawah Lingkungan Diknas
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010

Kecamatan	TK		SD		SLTP		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sebangki			17		3	1	
Ngabang	1	7	61	2	8	8	
Sengah Temila		1	60	3	7	11	
Mandor	1	1	34	0	5	5	
Menjalin	-	2	28	-	4	4	
Mempawah Hulu	-	2	41	2	4	7	
Menyuke	-	1	37	2	5	5	
Meranti	-	-	16	-	1	-	
Kuala Bahe	-	1	29	3	2	-	
Air Besar	1	0	36	-	4	-	
Sompak	-	-	13	-	2	1	
Jelimpo	-	-	30	1	4	5	
Banyuke Hulu	-	-	15	-	3	1	
Jumlah	2010	3	15	417	13	52	48
	2009	4	12	417	13	43	47
	2008	4	13	403	13	42	49

Sumber: Landak Dalam Angka 2010

Pembangunan sektor pendidikan tidak hanya diarahkan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja.

Melihat pada jenjang pendidikan maka penduduk usia sekolah di kelompokkan ke dalam empat kelompok umur yaitu 7–12 tahun (Sekolah Dasar), 13–15 tahun (SMP), dan 16–18 tahun (SMA). Penduduk usia sekolah (7–18 tahun) hasil susenas tahun 2010 untuk tingkatan usia 7-12 tahun sangat tinggi yaitu mencapai 97,12% dari total penduduk Kabupaten Landak. Untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2010 baru mencapai 50,94% dari total jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.23. berikut:

Tabel 2.23.

Presentase Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Kabuapten Landak 2010

Usia Sekolah	Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	Tdk/blm sekolah	2,31	1,72	2,02
	Masih sekolah	96,52	97,70	97,12
	Tdk bersekolah lagi	1,16	0,57	0,86
	Jumlah	100	100	100
13-15	Tdk/blm sekolah	-	0,30	0,16
	Masih sekolah	87,46	93,63	90,69
	Tdk bersekolah lagi	12,54	6,07	9,15
	Jumlah	100	100	100
16-18	Tdk/blm sekolah	-	0,57	0,23
	Masih sekolah	50,37	51,80	50,94
	Tdk bersekolah lagi	49,63	47,63	48,83
	Jumlah	100	100	100

Sumber: Landak Dalam Angka 2010

Kondisi pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar. Sebaran unit sekolah berdasarkan tingkatan dan kecamatan di Kabupaten Landak pada Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.7 sementara jumlah sekolah, murid, guru, lulusan dan rasio murid terhadap guru menurut tingkatan SD adalah seperti pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.

Banyaknya Murid, Guru SD dan Rasio Murid Terhadap Guru di Bawah Lingkungan Diknas 2010

Kecamatan	Murid		Guru		Rasio Murid Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sebangki	3.579	-	75	-	48	-
Ngabang	8.370	350	380	17	17	21
Sengah Temila	8.763	559	498	17	18	33
Mandor	4.551	-	227	0	20	-

Menjalin	3.358	-	192	-	17	-
Mempawah Hulu	3.013	-	235	-	13	-
Menyuke	4.501	200	203	28	22	7
Meranti	1.738	-	61	-	28	-
Kuala Bahe	2.621	221	97	12	27	18
Air Besar	3.974	-	148	-	27	-
Sompak	2.560	-	79	-	32	-
Jelimpo	3.878	72	126	8	31	9
Banyuke Hulu						
Jumlah	2010	53.179	1.402	2.481	82	21
	2009	52.222	1.897	2.060	65	26
	2008	54.939	1.384	3.989	66	14

Sumber: *Landak Dalam Angka 2010*

Dari rasio jumlah murid dan guru pada tingkatan SD masih sangat sangat rendah. Pada tahun 2010 rasio antara murid dan guru sekolah negeri sebesar 21%. Dengan demikian jelas salah satu kendala yang dihadapi Kabupaten Landak adalah masih terbatasnya jumlah guru untuk melayani secara maksimal penduduk Kabupaten Landak yang saat ini memasuki usia bersekolah antara 7-18 tahun.

2.3.2. Kesehatan

Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan tenaga kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sekaligus dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu fisik sumber daya manusia.

Rumah sakit merupakan salah satu prasarana kesehatan yang paling vital yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak pada tahun 2010, Kabupaten Landak sudah memiliki Rumah Sakit Umum, sedangkan Puskesmas yang ada meliputi 88 unit Puskesmas dan 19 puskesmas keliling. Secara lengkap terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.25.
Statistik Kesehatan Kabupaten Landak

URAIAN	SATUAN	2007	2008	2009
Fasilitas Kesehatan				
RSUD	Unit	1	1	1
Rumah Dokter	Buah	15	15	16
Pukesmas	Unit	73	84	88
Puskesmas Keliling	Unit	18	19	19
Tenaga Kesehatan				
Dokter Umum	Orang	18	23	25

Dokter Gigi	Orang	14	16	5
Bidan	Orang	95	102	125
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,72	64,98	65,22

Sumber: Bappeda Landak 2010

Selain itu, fasilitas yang sangat dibutuhkan lainnya yaitu enaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Landak saat ini terdiri dari 16 buah rumah dokter, 5 buah rumah dokter gigi, 33 buah rumah paramedis dan 3 buah mess paramedis. Dilihat dari kunjungan pasien ke Puskesmas di tahun 2010, 88.753 kunjungan merupakan kunjungan rawat jalan umum, 2.466 kunjungan merupakan kunjungan rawat jalan gigi dan 11.226 kunjungan merupakan kunjungan KIA.

2.3.3. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas penduduk dan kegiatan perekonomian antar daerah dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, jalan mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran berbagai aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Panjang jalan di Kabupaten Landak tahun 2010 tercatat sepanjang 1.285,42 km yang terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 982,42 km, jalan provinsi sepanjang 171,80 km dan jalan negara sepanjang 131,20 km. Dari 1.285,42 km panjang jalan ini jika dilihat dari jenis permukaannya, 633,08 km merupakan jalan aspal, 177,98 km merupakan jalan kerikil dan 474,36 km merupakan jalan tanah.

Berdasarkan kondisinya, terdapat 860,32 km jalan yang kondisinya baik, 234,26 km jalan yang kondisinya sedang, 91,76 km kondisinya rusak dan 99,08 km kondisinya rusak berat. Banyaknya jembatan yang telah dibangun hingga tahun 2010 di Kabupaten Landak tercatat sebanyak 995 buah jembatan yang merupakan jembatan kabupaten. Dari 995 buah jembatan ini jika dilihat dari jenis rangka yang dipakai, 6 buah berangka baja, 97 berangka beton, 335 menggunakan rangka kayu, 5 merupakan jembatan gantung dan 552 merupakan gorong-gorong dan box. Melihat dari kondisinya, terdapat 771 buah jembatan yang masih kondisinya baik, 57 buah jembatan yang kondisinya sedang, 83 buah jembatan kondisinya rusak dan 84 buah jembatan kondisinya rusak berat.

Tabel 2.26.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan
di Kabupaten Landak
Tahun 2010 (Km)

Kondisi Jalan		Status Jalan				Jumlah
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Baik	136,67	127,66	601,99	--	860,32	
Sedang	0,40	35,40	198,46	--	234,26	
Rusak	0,13	7,04	84,59	--	91,76	
Rusak Berat		1,70	97,36	--	99,08	
Jumlah	2010	131,20	171,80	982,42	-	1.285,42
	2009	131,20	171,80	982,42	871,89	2.157,31
	2008	-	-	982,42	860,51	1.842,93

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Landak

2.3.4. Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumahtangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Dari tabel yang disajikan dapat dilihat jumlah pelanggan listrik per kecamatan dirinci menurut kelompok pelanggan, yakni pelanggan rumahtangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah.

Dari jumlah pelanggan listrik sebanyak 18.417 pelanggan, kelompok pelanggan rumahtangga merupakan pelanggan listrik terbesar yakni 17.134 pelanggan (93,03 %) kemudian kelompok usaha 659 pelanggan (3,58 %), kelompok sosial 509 pelanggan (2,76 %), kelompok pemerintah 114 pelanggan (0,62%) dan kelompok industri 1 pelanggan .

Tabel 2.27.
Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Ranting/Unit dan Golongan di Kabupaten Landak 2010

Ranting/Unit	Rumah Tangga	Industri	Badan Sosial	Usaha	Perkantoran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. Ranting Ngabang	7.436	1	183	491	70	8.181	
2. Unit Pahauman	3.408	0	115	88	11	3.622	
3. Unit Senakin	2.692	0	84	35	11	2.811	
4. Unit Darit	2.608	0	10	34	14	1.756	
5. Unit Mandor	--	--	--	--	--	--	
6. Unit Menjalin	--	--	--	--	--	--	
7. Unit Karangany	--	--	--	--	--	--	
8. Unit Serimbu	990	0	27	11	8	1.036	
Jumlah	2010	17.134	1	509	659	114	18.417
	2009	15.973	1	483	615	111	17.183
	2008	15.067	1	428	604	97	16.197

Sumber: Landak Dalam Angka 2010

2.3.5. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk, baik untuk memasak dan minum maupun untuk mencuci dan mandi. Sebagian besar penduduk masih mempergunakan air yang bersumber dari air hujan dan air sungai, karena masih terbatasnya jaringan yang dimiliki oleh PDAM.

Pengelolaan air oleh PDAM di Kabupaten Landak tidak terdapat di semua kecamatan, hanya beberapa kecamatan saja, seperti Kecamatan Ngabang, Kecamatan Mandor, Kecamatan Air Besar dan Kecamatan Menyuke dan jumlah pelanggannya pun masih sangat terbatas. Jumlah pelanggan pada tahun 2010 sebanyak 773 pelanggan yang berarti mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang sebanyak 768 pelanggan. Pelanggan terbanyak adalah dari kalangan rumah tangga yaitu sebesar 455 pelanggan (58,86 %).

Tabel 2.28.
Banyaknya Pelanggan dan Penyaluran Air Minum Menurut Jenis Pelanggan
di Kabupaten Landak Tahun 2010

Jenis Pelanggan		Jumlah Pelanggan	Penyalur Air	
			Banyaknya (m3)	Nilai (Rp.000)
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Sosial		35	18.903	6.616
2. Rumah Tangga		445	117.210	115.707
3. Instansi Pemerintah		10	2.118	1.694
4. Niaga		273	78.673	157.346
5. Industri		-	-	-
6. Khusus		-	-	-
7. Susut/Hilang		-	-	-
Jumlah	2010	773	216.904	281.363
	2009	768	195.077	256.436
	2008	842	123.076	352.491

Sumber: Landak Dalam Angka 2010

2.3.6. Keluarga Berencana

Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Di samping itu program keluarga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Jumlah peserta KB aktif Kabupaten Landak tahun 2010 mencapai 42.898 atau 67,02 persen dari pasangan usia subur. Jika dirinci menurut alat kontrasepsi yang digunakan terdiri dari IUD 1.099, Pil 19.679, kondom 1.149, suntikan 18.566, Implant 1.548 dan lainnya 857.

Tabel 2.29.
Jumlah Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi
Di Kabupaten Landak 2010

Kecamatan	PUS	Mix Kontrasepsi			
		IUD	PIL	Kondom	Suntikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sebangki	3.394	6	1.162	52	1.032
Ngabang	11.564	-	4.157	64	4.627
Sengah Temila	9.776	164	2.957	786	2.405
Mandor	7.706	87	2.326	78	2.486
Menjalin	3.129	10	735	30	980
Mempawah Hulu	5.468	382	1.353	20	1.107
Menyuke	5.317	396	1.381	14	1.159
Meranti	1.869	3	510	19	473
Kuala Bahe	2.467	29	836	-	644
Air Besar	3.248	10	956	15	654
Sompak	2.984	12	1.123	58	587
Jelimpo	4.432	-	1.758	-	1.714
Banyuke Hulu	2.651	-	425	43	698

Jumlah	2010	64.005	1.099	19.679	1.149	18.566
	2009	58.775	1.136	17.006	928	16.063
	2008	59.926	1.233	16.617	167	14.660

Sumber: *Landak Dalam Angka 2010*

2.3.7.Sosial

Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Landak cukup besar, sampai dengan tahun 2010 sebanyak 4.625 orang yang dapat dilihat pada Tabel 2.30. di bawah ini.

Tabel 2.30.
Penderita Cacat Kab. Landak
Tahun 2004

No.	Uraian	2010
1	Tuna Daksa	2.603
2	Tuna Rungu	349
3	Tuna Grahita	274
4	Tuna Netra	399
7	Jumlah	4.625

Sumber Data : *Landak Dalam Angka Tahun 2010*

Jumlah penyandang rawan sosial tahun 2004 Kab. Landak sebanyak 25.031 orang yang terdiri dari Lanjut Usia sebanyak 5.530 orang dan Anak Terlantar sebanyak 19.501 seperti yang terlihat dalam Tabel 2.31. di bawah ini.

Tabel 2.31.
Banyaknya Penduduk Lanjut Usia dan Anak Terlantar
Tahun 2010

Kecamatan	Lanjut Usia	Anak Terlantar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebangki	2.090	20	2.110
Ngabang	6.395	25	6.420
Jelimpo	2.725	17	2.742
Sengah Temila	6.711	26	6.737
Mandor	3.397	21	3.418
Menjalin	2.405	5	2.410
Mempawah Hulu	4.307	70	4.377
Sompak	1.810	9	1.819
Menyuke	3.577	31	3.608
Banyuke Hulu	1.515	23	1.538
Meranti	1.180	67	1.247
Kuala Bahe	1.710	83	1.793
Air Besar	2.785	16	2.801
Jumlah	2010	40.607	413
	2009	-	-
	2008	40.364	-

Sumber: *Landak Dalam Angka 2010*

Penanganan dan/atau perhatian terhadap penyandang cacat maupun penyandang rawan sosial belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak. Alasannya adalah data penyandang cacat dan penyandang rawan sosial belum ditata dengan baik.

2.3.8. Pariwisata

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Landak. Beberapa daerah wisata yang dimiliki terus dikembangkan oleh pemerintah untuk menggaet turis lokal maupun internasional. Berikut program pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak:

Tabel 2.32.
Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Landak
Tahun 2006-2011

No	Tempat Pariwisata	Jenis
1	Makam Juang Mandor	Wisata Sejarah
2	Gunung Sehaq	Wisata Alam
3	Rumah Betang Sahapm	Wisata Budaya
4	Istana Kerajaan Landak	Wisata Sejarah
5	Riam Banangar	Wisata Alam

Selain mengaktifkan program pengembangan pariwisata, pemerintah Kabupaten Landak juga menggerakkan event-event untuk mendukung kegiatan pariwisata. Berikut event-event yang pernah menjadi program yang dikembangkan di Kabupaten Landak.

- Tumpang Negeri dan ziarah akbar Kerajaan Landak di Ngabang.
- Robok-robok
- Naik Dango
- Festival Nunu Poe'
- Ziarah Makam Juang Mandor
- Festival Budaya Binua Landak (FBBL)
- Paket wisata Landak Adventure (Mendulang Intan-Arung Jeram)

Dalam tentu masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Landak seperti infrastruktur jalan menuju tempat wisata dan sarana-sarana penginapan seperti hotel. Namun kendala-kendala dapat dihadapi apabila adanya kerjasama antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.3.9. Kehidupan Beragama

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia menjamin kehidupan beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan hidup antar pemeluk agama. Agama sebagai sistem moral dan etika idealnya dapat menuntun masyarakat kepada kehidupan yang bermoral dan berbudi luhur. Pembangunan bidang agama adalah upaya untuk memenuhi salah

satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pembangunan di bidang agama masih diperlukan upaya untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat sehingga menjadikan agama sebagai motivasi dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Landak telah memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya dengan mudah dan aman.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Landak dalam mengembangkan kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan akhlak dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa membangun masyarakat yang religius dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya.

Menunjang kehidupan beragama pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Landak membangun berbagai prasarana ibadah antara lain masjid 107 buah, surau 63 buah, gereja Protestan 702 buah, kapel Protestan 97 buah, gereja Katolik 288 buah, kapel Katolik 62 buah, Pura 2 buah dan Vihara 1 buah.

Jumlah orang yang berkorban pada tahun 2010 sebanyak 500 orang dengan jumlah hewan kurban 132 ekor yang terdiri dari: sapi 61 ekor dan kambing 71 ekor. Jumlah orang yang berkorban terbanyak terdapat di Kecamatan Ngabang (232 orang), Mandor (83 orang) dan Menyuke (43 orang).

Berbagai fasilitas keagamaan yang tersedia di Kabupaten Landak dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Jumlah Sarana Tempat Ibadah Menurut Status/Fungsi
di Kabupaten Landak Tahun 2009

No	Kecamatan	Masjid	Langgar/Surau	Gereja & Kapel		Pura	Wihara
				Katolik	Protestan		
1	Sebangki	21	12	6	25	1	3
2	Ngabang	26	20	110	159	1	0
3	Jelimpo	1	0	30	29	0	0
4	Sengah Temila	12	4	51	118	0	1
5	Mandor	14	5	21	93	0	0
6	Menjalin	2	3	10	44	0	0
7	Mempawah Hulu	6	3	13	66	0	0
8	Sompak	1	0	7	10	0	0
9	Menyuke	5	2	33	102	0	0
10	Banyuke Hulu	1	0	10	15	0	0
11	Meranti	4	4	12	53	0	0
12	Kuale Behe	6	5	16	40	0	0
13	Air Besar	8	5	33	45	0	0
	JUMLAH	107	63	799	350	2	1

Sumber: Landak Dalam Angka 2010

Tantangan lima tahun ke depan yaitu perlu mengarahkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi tempat peribadatan bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual namun menjadi sentral kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial lainnya.

2.4. DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota

lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pembangunan perekonomian daerah sampai dengan tahun 2011 telah memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan menuju pusat agrobisnis dan agroindustri di Kabupaten Landak, dengan ditandai meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari masa kritis sampai masa pertumbuhan yang relatif stabil.

Keberhasilan pembangunan tentu selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur kinerja pembangunan tersebut. Mengingat pentingnya indikator-indikator sebagai pendekatan dalam melakukan penilaian situasi, memfasilitasi perumusan strategi, mengidentifikasi permasalahan strategi dan operasional yang ada, dalam rangka memberikan umpan balik bagi formulasi kebijakan, dan program serta kegiatan operasional dalam pembangunan Kabupaten Landak dalam masa yang akan datang. Indikator-indikator yang bisa dilihat pada suatu daerah atau sejauh mana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Umumnya hal tersebut dapat dilihat dari potensi yang dimiliki, kondisi ekonomi, dan kondisi social ekonomi daerah.

1. Potensi Unggulan Daerah

Lingkungan strategis sangat berpengaruh serta sebagai factor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Landak untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Pemerintah Landak dipengaruhi oleh factor intern di lingkungan Kabupaten Landak.

Demikian juga kondisi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Landak, pembangunan ekonomi tidak saja difokuskan pada pertumbuhan tinggi, akan tetapi lebih diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang lebih merata, meningkatkan pelayanan LKM dan USP/KSP, serta memfasilitasi akses UMKM untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan. Oleh karena itu setiap potensi-potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus ditingkatkan dan dieksploitasi secara keseluruhan dalam tingkat yang wajar.

Potensi unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Landak selama ini masih terkait dengan sector pertanian dalam arti luas yaitu subsektor pertanian/perkebunan/ kehutanan/peternakan/perikanan.

Sektor pertanian mendapat angka paling besar yaitu 2,02, berarti Kabupaten Landak dominant dalam pertanian di Kalimantan Barat, 3 jenis produk pertanian dalam arti luas selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Jenis Produk Pertanian

No	Jenis Produk	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Padi Sawah	Ton	200.250	215.476	199.555	203.032	203.439
2	Karet	Ton	38.759	31.333	31.337	39.402	42.113
3	Kelapa Sawit	Ton	41.838	76.079	76.095	47.155	49.113

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dan Perkebunan Tahun 2009 dan 2010

Ketiga produksi pertanian secara umum di atas dapat disimpulkan mengalami term yang naik setiap tahunnya, yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Sebagai ilustrasi produksi sektor pertanian yang menjadi potensi unggulan pada Kabupaten Landak pada tahun 2010 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Table 2.35.
Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

No	Jenis Produk	Satuan	2010
1	Padi Sawah	Ton	186.745
2	Padi Ladang	Ton	16.694
3	Jagung	Ton	25,37
4	Kacang Hijau	Ton	10
5	Karet	Ton	42.113
6	Kelapa Sawit	Ton	49.113
7	Kelapa Dalam	Ton	36
8	Kelapa Hybrida	Ton	187
9	Kopi	Ton	545
10	Kakao	Ton	750
11	Sapi Potong	Ekor	75.348
12	Kambing	Ekor	11.316
13	Babi	Ekor	556.510
14	Ayam Buras	Ekor	43.778
15	Ayam Pedaging	Ekor	544.800
16	Itik	Ekor	3.620
17	Perikanan Kolam	Ton	321,70
18	Perikanan Benih	Ekor	1.432.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dan Perkebunan Tahun 2009 dan 2010

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kinerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat

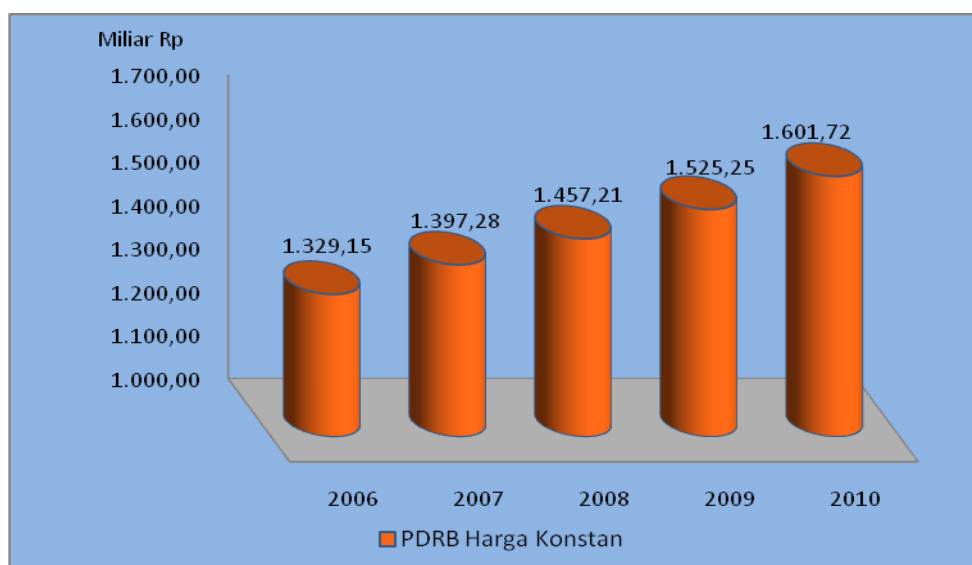
dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi pertumbuhan PDRB semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pertumbuhan ekonomi antar tahun tanpa pengaruh naik turunnya faktor harga karena harga yang digunakan adalah harga konstan, yaitu harga pada tahun 2000. Selama penghitungan PDRB, BPS telah menggunakan tahun dasar sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun dasar 1973, kedua tahun dasar 1983, yang ketiga pada tahun 1993 dan terakhir tahun dasar 2000 yang mulai digunakan untuk penghitungan PDRB pada tahun 2004.

Pada tahun dasar 2000 seperti juga tahun dasar 1993, sektor diklasifikasikan ke dalam 9 sektor, di mana sebelumnya yaitu berdasarkan atas dasar harga tahun 1983 cakupannya meliputi 11 sektor ekonomi. Hal tersebut bukan berarti dua sektor telah ditiadakan, namun dua sektor tersebut digabungkan dengan sektor lainnya. Sektor sewa rumah (sewa bangunan) yang pada tahun dasar 1983 berdiri sendiri, pada tahun dasar 2000 digabungkan dengan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Demikian juga dengan sektor pemerintah dan pertahanan pada tahun dasar 2000 dimasukkan dalam sektor jasa-jasa. Disamping itu, dilihat dari sub sektornya terdapat beberapa sub sektor yang disatukan misalnya perkebunan yang pada tahun dasar 1983 dipecah menjadi dua yaitu perkebunan besar dan rakyat, pada tahun dasar 2000 keduanya disatukan menjadi sub sektor perkebunan. Sektor industri, yang pada tahun dasar 1983 diklasifikasikan ke dalam tiga sub sektor yaitu industri besar dan sedang, industri kecil dan industri rumah tangga, pada tahun dasar 2000 uraiannya dipecah ke dalam sub sektor industri migas dan non migas. Dengan demikian, pada dua sub sektor tersebut telah dicakup sub sektor industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumahtangga. Demikian juga terhadap beberapa sektor lainnya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah banyak melahirkan perubahan bagi Kabupaten Landak baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi secara makro dicerminkan oleh peningkatan pendapatan perkapita yang diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya.

Gambar 2.5.

**Produk Domestik Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan
Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2010**

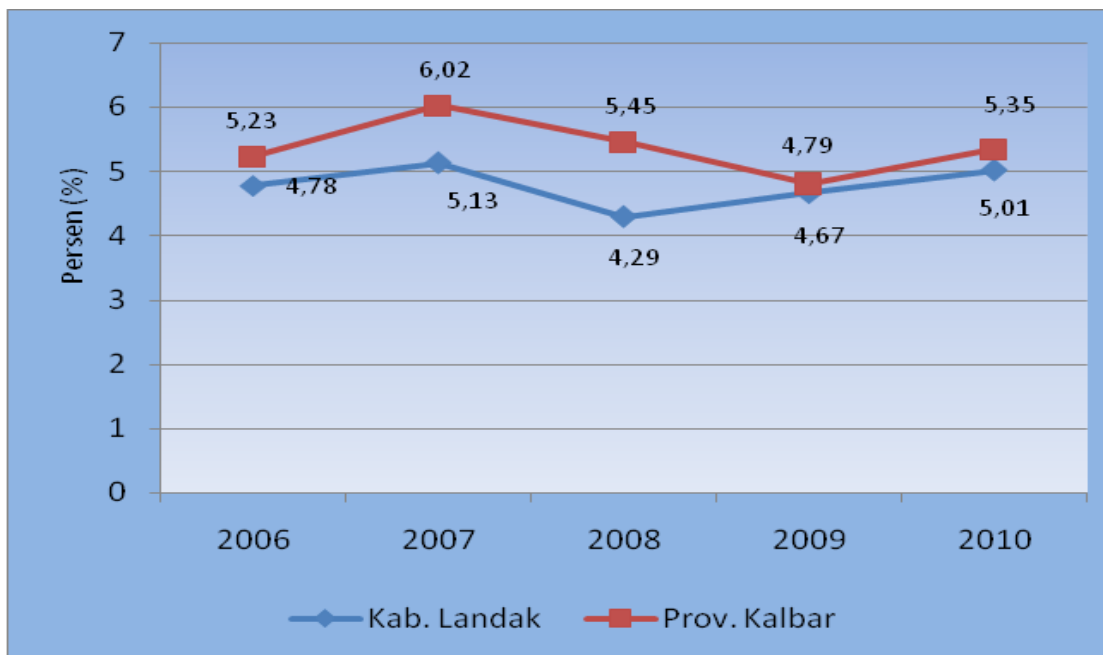


Grafik di atas menunjukkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Landak yang cenderung meningkat setiap tahun dalam kurun waktu 2006 – 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Landak pada tahun 2006 sebesar 1.329.153,83 juta rupiah, meningkat menjadi 1.525.247,22 juta rupiah di tahun 2009, dan pada tahun 2010 meningkat mencapai 1.601.720,55 juta rupiah.

Meskipun secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Landak cenderung meningkat, namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak tahun 2007 sebesar 5,13 persen, kemudian turun menjadi 4,29 persen tahun 2008. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan ekonomi menjadi 4,67 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 5,01 persen. Hal ini berarti secara riil terjadi peningkatan perekonomian di Kabupaten Landak. Sementara itu, secara total pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan menjadi 5,35 persen. Di mana sebelumnya pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 5,42 persen tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen tahun 2009. (lihat Gambar 2.6)

Gambar 2.6.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak dan Provinsi Kalbar Tahun 2006 – 2010



Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan di Kabupaten Landak, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan untuk menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan sektor-sektor yang membentuk PDRB. Penyajian Statistik Pendapatan Regional secara sektoral merupakan alat bantu untuk melihat perubahan dan

perkembangan tersebut. Dari penyajian ini juga dapat dilihat sektor-sektor yang mengalami penurunan dan kenaikan pertumbuhan sehingga bisa digunakan untuk bahan analisis selanjutnya.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau disebut juga pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2010 mencapai 5,01 persen merupakan agregasi dari pertumbuhan sektor dan sub sektor pembentuk PDRB. Selama tahun 2010, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.36.
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2009 - 2010

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Berlaku (Miliar Rupiah)		Atas Dasar HargaKonstan (Miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (Persen)	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	Pertanian	1.394,15	1.497,77	791,54	804,90	5,09	1,69
2	Pertambangan dan Penggalian	43,36	47,63	25,13	26,17	1,72	4,13
3	Industri Pengolahan	227,38	300,50	170,41	176,96	0,57	3,85
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,89	8,94	3,93	4,30	4,48	9,47
5	Konstruksi	68,43	79,44	39,49	39,56	6,30	8,40
6	Perdagangan, Hotel dan Restoral	536,33	640,31	312,18	349,88	5,67	12,08
7	Pengangkutan dan Komunikasi	66,66	73,42	35,08	36,98	6,00	5,41
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	126,30	140,51	71,06	77,42	6,06	8,94
9	Jasa-Jasa	150,79	172,51	79,42	85,56	4,20	7,72
	PDRB Kabupaten Landak	2.671,28	2.961,04	1.525,25	1.601,72	4,67	5,01

Sumber: Bappeda Kab. Landak

Walaupun semua sektor mengalami pertumbuhan pada tahun 2010, namun jika dibandingkan 2009, ada dua sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu: sektor pertanian serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan pada tahun 2009 jika dibandingkan pada tahun 2008, ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara sektor lainnya mengalami percepatan pertumbuhan.

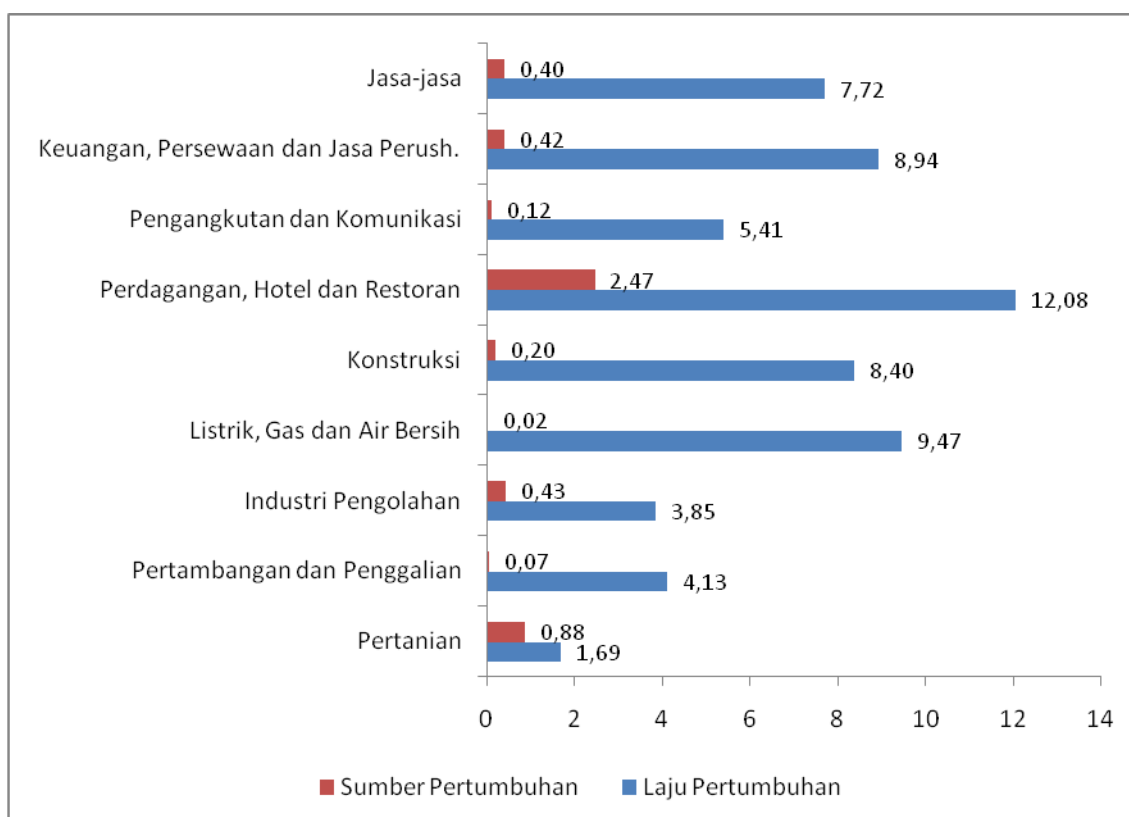
Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 12,08 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi dengan pertumbuhan diatas lima persen adalah sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 9,87 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,94 persen, sektor konstruksi sebesar 8,40 persen, sektor jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan

sebesar 7,72 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,41 persen.

Sementara itu terdapat tiga sektor yang mencapai pertumbuhan dibawah lima persen. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 4,13 persen, sektor industri pengolahan 3,85 persen, serta sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 1,69 persen. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.7. di bawah ini.

Gambar 2.7.
Sumber dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak Tahun 2010



Sumbangan masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumber pertumbuhan masing-masing sektor. Sektor yang dominan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak pada tahun 2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dapat dilihat dari sumber pertumbuhan terbesar yang berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 2,47 persen. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor tersebut. Sektor berikutnya yang memberikan sumbangan cukup besar adalah sektor pertanian yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,88 persen. Walaupun dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah pada tahun 2010, namun sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak. Sejak beberapa tahun terakhir kontribusi kedua sektor tersebut cukup berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak.

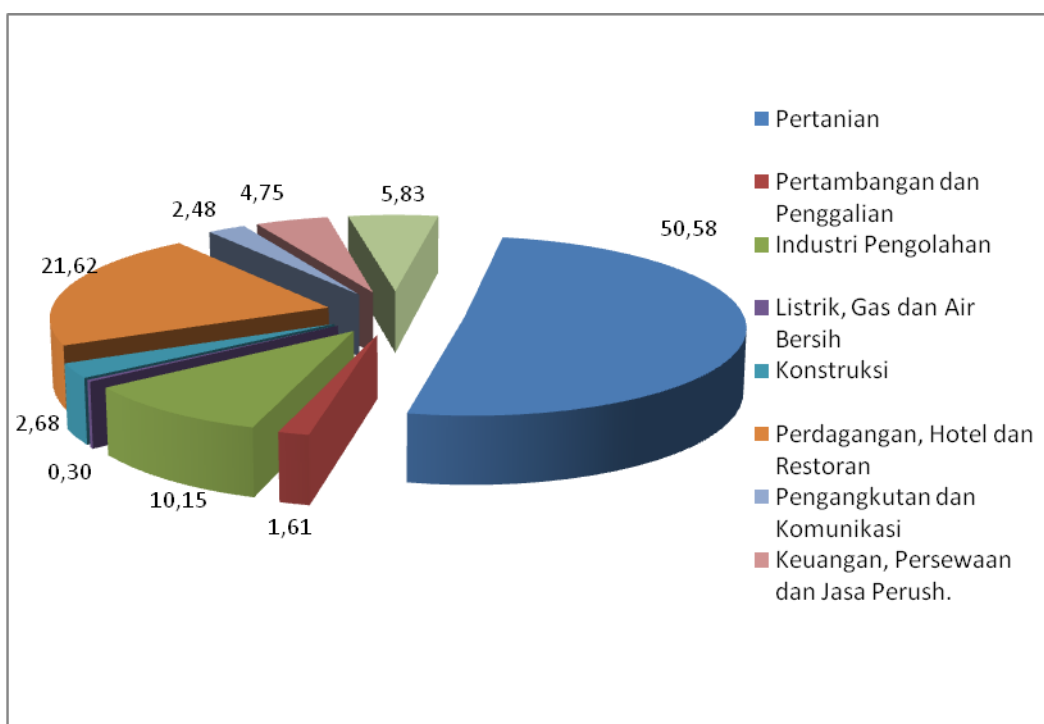
3. Struktur Perekonomian

Distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Struktur perekonomian di Kabupaten Landak sampai dengan tahun 2010 masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 82,36 persen.

Sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Landak dengan peranannya sebesar 50,58 persen. Hal ini berarti bahwa naik turunnya pertumbuhan di sektor pertanian akan sangat mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Landak. Dengan demikian, sektor pertanian masih menjadi *leading sector* atau dengan kata lain sebagai sektor pemimpin bagi sektor-sektor produksi lainnya dalam menyumbang perekonomian di Kabupaten Landak. Dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian dari 52,19 persen menjadi 50,58 persen.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran masih tetap menjadi kontributor terbesar kedua setelah sektor pertanian dengan peranannya sebesar 21,62 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2010 terjadi kenaikan peranan dari 20,08 persen menjadi 21,62 persen. Sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar ketiga dengan peranannya sebesar 10,15 persen pada tahun 2010, mengalami penurunan kontribusi dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 10,38 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Landak dapat dilihat dalam Gambar 2.10. di bawah ini.

Gambar 2.8.
Struktur Ekonomi Kabupaten Landak Tahun 2010



Sektor-sektor yang lainnya hanya memberikan kontribusi kurang dari 20 persen, yaitu sektor pertambangan dan penggalian memberikan peranan sebesar 1,61 persen; sektor konstruksi 2,68 persen; sektor pengangkutan

dan komunikasi 2,48 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 4,75 persen; sektor jasa-jasa 5,83 persen.

Sedangkan sektor listrik, gas dan air minum memberikan kontribusi terkecil. Tetapi dibandingkan pada tahun 2008, pada tahun 2009 hingga tahun 2010 telah terjadi peningkatan kontribusi sektor listrik, gas dan air minum. Pada tahun 2008 sebesar 0,28 persen meningkat menjadi 0,30 persen. Rendahnya peranan sektor ini disebabkan karena masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan listrik dan air bersih.

3. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang lebih tinggi berarti juga terjadinya lonjakan harga yang tajam. Hal tersebut bisa mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat jika pendapatan masyarakat tidak meningkat melebihi laju inflasi.

Tabel 2.37.
Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi Kabupaten Landak dan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Tahun	Kabupaten Landak		Provinsi Kalimantan Barat	
	Indek Harga Implisit	Laju Inflasi (%)	Indek Harga Implisit	Laju Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006	145,44	5,34	152,27	5,82
2007	252,73	5,02	161,76	6,23
2008	166,49	9,01	179,06	7,01
2009	175,14	5,19	188,61	5,33
2010*)	184,87	5,55	199,64	5,85

Sumber: Bappeda Kab. Landak

Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen dapat dilihat dari indeks harga implisit PDRB. Indeks harga implisit di tahun 2009 sebesar 175,14 dan di tahun 2010 sebesar 184,87. Dengan demikian pertumbuhan indeks harga implisit di tahun 2010 adalah sebesar 5,55 persen. Angka ini menggambarkan laju inflasi atas dasar harga produsen di Kabupaten Landak meningkat sebesar 5,55 persen. Laju inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi secara umum yang terjadi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Perbandingan Dengan Kalimantan Barat

Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, perlu dioptimalkan sektor-sektor yang menjadi tumpuan daerah. Sektor tersebut disamping mampu dikembangkan juga akan memberikan dampak terhadap

perkembangan sektor lain (*linkage effect*) serta sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan diharapkan pula menjadi pemasok pendapatan daerah dengan diekspor ke luar daerah.

Indeks *Location Quotient* (LQ) dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat sektor-sektor potensial suatu daerah atau dengan kata lain untuk melihat spesialisasi sektoral di Kabupaten Landak. Secara teoritis, kriteria analisis angka indeks LQ yaitu :

- Jika Indeks LQ lebih kecil dari 1 (satu), maka sektor yang bersangkutan bukan spesialisasi daerah dan tidak terkonsentrasi di Kabupaten Landak.
- Jika Indeks LQ sama dengan 1 (satu), maka sektor yang bersangkutan proporsinya sama dengan Provinsi Kalimantan Barat.
- Jika Indeks LQ lebih besar dari 1 (satu), maka sektor yang bersangkutan merupakan spesialisasi daerah dan terkonsentrasi di Kabupaten Landak.

Tabel 2.38.
Location Quotient (LQ) Kabupaten Landak Terhadap
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010

No	Sektor	Peran Sektoral		LQ
		Kalbar	Landak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	25,00	50,58	2,02
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,61	0,81
3	Industri Pengolahan	18,29	10,15	0,55
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,51	0,30	0,59
5	Konstruksi	9,14	2,68	0,29
6	Perdagangan, Hotel dan Restoral	22,87	21,62	0,95
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,60	2,48	0,33
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,74	4,75	1,00
9	Jasa-Jasa	9,87	5,83	0,59

Sumber: Bappeda Kab. Landak

Berdasarkan *Indeks Location Quotient* (LQ) Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat, sektor-sektor yang memiliki LQ lebih dari 1 (satu) yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kedua sektor ini merupakan sektor-sektor yang diharapkan dapat menjadi tumpuan atau spesialisasi untuk dikembangkan bahkan dapat menjadi komoditi ekspor Kabupaten Landak. Selain itu masih ada dua sektor yang berpeluang menjadi sektor unggulan karena mempunyai nilai LQ cukup besar (nilai LQ mendekati 1), yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai LQ paling rendah adalah sektor bangunan serta sektor pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing memiliki nilai LQ sebesar 0,29 dan 0,33. Kedua sektor ini bukan merupakan spesialisasi daerah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya sarana transportasi.

6. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB per kapita ini dapat diketahui besaran pendapatan yang potensial dihasilkan oleh setiap penduduk di wilayah Kabupaten Landak.

Tabel 2.39.
Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2010

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2006	6.518.427,54	10,13
2007	7.137.251,74	9,49
2008	7.465.592,27	4,60
2009	8.066.163,03	8,04
2010*)	8.982.389,91	11,36

Sumber: Bappeda Kab. Landak , Keterangan: *) Angka Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Landak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, PDRB per kapita Kabupaten Landak adalah sebesar Rp. 7.465.000,- yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Landak selama setahun adalah Rp. 7.456.000,- atau sebesar Rp. 622.000,- per bulan. Pada tahun 2009, PDRB per kapita Kabupaten Landak adalah Rp. 8.066.000,- yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Landak selama setahun adalah Rp. 8.066.000,- atau sebesar Rp. 672.000,- per bulan.

Pada tahun 2010, PDRB per kapita di Kabupaten Landak mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita mencapai Rp. 8.982.000,- setahun atau Rp. 749.000,- per bulan. Persentase peningkatannya hingga 11,36 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang cepat harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

2.4.2. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan guna mengembangkan daya saing daerah terutama dalam pelayanan masyarakatnya. Beberapa program prioritas yang menjadi fokus program tahun 2006-2011 yaitu pembangunan jalan, listrik dan sumber daya air. Berikut tabel ruas jalan menurut status jalan di Kabupaten Landak tahun 2009.

Tabel 2.40.
Panjang Ruas Jalan Menurut Status Jalan
di Kabupaten Landak Tahun 2009

URAIAN	SATUAN	2007	2008	2009
Jalan Nasional	Kilometer	131,20	131,20	131,20
Jalan Provinsi	Kilometer	171,80	171,80	171,60
Jalan Kabupaten	Kilometer	819,85	982,42	982,42
Jalan Lainnya	Kilometer	858,74	860,51	871,89

Sumber: *Bappeda Landak 2010*

Semua kecamatan dapat di lewati dengan transportasi darat yang kondisi jalannya baik dan ada beberapa kecamatan yang dapat dilewati baik dengan transportasi darat maupun dengan angkutan sungai. Kabupaten Landak sangat strategis karena merupakan lintasan antar negara khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu lintasan antar kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat.

Secara umum Kabupaten Landak telah tersedia jaringan listrik yang relatif baik, listrik ini dipasok dari Pembangkit Listrik Pontianak, Pembangkit Listrik Sanggau dan Pembangkit Listrik Ngabang.

Sumber air utama dari hujan yang kemudian mengalir beberapa sungai besar antara lain; Sungai Landak, Sungai Menyuke, Sungai Mempawah, Sungai Mandor dan Sungai Sengah.

Sarana telekomunikasi di Kabupaten Landak seluruh ibu kota kecamatan (kecuali sebangki) telah terjangkau jaringan telekomunikasi GSM (Telkomsel, Indosat, XL) dan untuk jaringan telpon tetap (fixed line) baru terlanyi di Kota Ngabang dan Kota Pahauman.

Kabupaten Landak telah dilayani oleh 4 (empat) bank umum yaitu Bank Kalbar, Bank Danamon, Bank BNI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk BRI sendiri terdapat 1 (satu) kantor cabang pembantu dan 3 (tiga) kantor unit (Pahauman, Ngabang, Karangan) serta lembaga keuangan masyarakat baik koperasi maupun credit union.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Dalam mengembangkan iklim berinvestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak pada tahun 2006-2011 menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Landak, yaitu:

- Membangun Sistem Perekonomian Kerakyatan yg ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
- Mengembangkan Perindustrian, Perdagangan dan Jasa melalui Pembinaan dan Pengembangan Usaha/ Pelaku Ekonomi.
- Mewujudkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam secara Efisien & Sinergis sehingga mampu mengembangkan Perekonomian Daerah.
- Mengembangkan Perindustrian, Perdagangan dan Jasa melalui Pembinaan dan Pengembangan Usaha/Pelaku Ekonomi.
- Melakukan Kerjasama dengan Organisasi Non Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan Luar Negeri.

Suasana yang kondusif di Kabupaten Landak tahun 2006-2011 sangat memungkinkan para investor untuk berinvestasi dalam bidang pengembangan

sumber daya alam, tambang dan energi. Suasana yang kondusif ini terlihat dengan kurangnya angka kriminalitas dan demonstrasi yang dapat berdampak pada penurunan iklim berinvestasi.

Indikator keamanan dapat dilihat dari statistik kriminal yang perlu diamati dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan merupakan ancaman serius terhadap kondisi keamanan dan ketertiban.

Pada tahun 2010 di Kabupaten Landak terdapat 284 kasus kejahatan kriminal. Adapun kasus yang terbanyak terjadi pada bulan Desember dengan 35 kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010 terdapat 92 kasus dengan korban meninggal sebanyak 58 orang, luka berat 60 orang dan luka ringan 58 orang. Total kerugian material yang diakibatkan sebesar 342.500.000 rupiah pada tahun yang sama.

Selama tahun 2010, kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 92 kasus, dibandingkan tahun 2009 meningkat 9,5 persen. Selama tahun 2010, pelanggaran lalu lintas sebanyak 564 kasus dengan pelanggaran surat-menyurat paling banyak (72,52%).

Tabel 2.41.
Angka Kriminalitas
Kabupaten Landak 2009

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah kasus narkoba	-	-	5	6
2.	Jumlah kasus pembunuhan	-	-	1	5
3.	Jumlah kejahatan seksual	4		7	3
4.	Jumlah kasus penganiayaan	13	3	19	21
5.	Jumlah kasus pencurian	-	-	207	73
6.	Jumlah kasus penipuan	-	-	15	10
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	2	-
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	17	3	256	118
9.	Jumlah penduduk	321.575	327.712	335.185	343.626
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,05	0,01	0,76	0,34

Sumber: Landak Dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2010, 2011

Iklim berinvestasi di Kabupaten Landak sangat kondusif. Sebagian besar kriminalitas hanya terjadi pada kasus pencurian saja. Demonstrasi (rusuh massal) hanya ditemukan 2 kasus tahun 2009. Mengingat demonstrasi merupakan indikator penting untuk menentukan keamanan dalam berinvestasi, maka Kabupaten Landak dapat dikata sebagai wilayah yang aman dalam berinvestasi. Hal ini mengingat hanya ditemukan 2 kasus dalam kegiatan demonstrasi. Namun kendala membangun iklim berinvestasi ini justru ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak di luar dari kendala tingginya pencurian yaitu:

1. Lemahnya kemampuan untuk memprediksi kebutuhan pasar, sehingga penanganan produk unggulan belum terfokus dan sulit terpetakan.
2. Infrastruktur yang kurang memadai.
3. Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang menyebabkan rendahnya daya saing, sehingga usaha-usaha yang sudah ada sulit berkembang.
4. Belum maksimalnya pelayanan birokrasi dikarenakan belum terpadunya pelayanan dan kepastian hukum sehingga iklim investasi kurang kondusif.
5. Belum adanya sistem yang mengontrol keseriusan investor dalam berinvestasi.

Tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Landak akan mengalakan iklim berinvestasi ini dengan membuat kebijakan baru pengembangan kawasan industri. Pengembangan industri di Kabupaten Landak ini diarahkan pada:

- Lokasi pengembangan utama terletak di Kecamatan Mandor dan Kecamatan Ngabang.
- Industri yang bersifat polutif harus berlokasi lebih dari 3 km dari pusat kota.
- Pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
- Kawasan industri akan diarahkan di sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta berdekatan dengan kawasan pemukiman.
- Pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan terutama industri pengolahan hasil tanaman bahan makanan dan perkebunan, yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjangnya.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Secara komposit, peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli.

Namun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk membangun Kabupaten landak memang masih sangat rendah. Saat ini hanya 3.645 orang saja yang lulus Strata S1, 55 orang lulus strata S2 dan hanya 1 orang lulus Strata S3. Untuk lebih jelasnya perbandingan antara tingkatan sekolah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	69.264
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	70.018
3	Tamat SD/Sederajat	95.804
4	SLTP/Sederajat	52.205
5	SLTA/Sederajat	48.123
6	Diplpoma I/II	2.017
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	2.553
8	Diploma IV/Strata I	3.645
9	Strata II	55
10	Strata I	1
	Jumlah	343.626

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan disajikan dalam Table 2.42. di atas. Jumlah penduduk terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan adalah penduduk yang tamat SD/Sederajat sebanyak 95.804 jiwa atau 27,88% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Landak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Landak. Berbagai faktor yang menghambat pendidikan di Kabupaten Landak antara lain disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Landak. Masih terdapat pula di beberapa daerah yang masih terisolir yang menyebabkan sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007 s/d Tahun 2011
Kabupaten Landak

No.	Uraian	2007(Rp)	2008(Rp)	2009(Rp)	2010(Rp)	2011(Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4,010,675,500.00	6,331,461,285.42	12,397,678,860.00	12,996,831,782.52	17,026,479,296.00	2.00
1.1.1.	Pajak daerah	1,450,920,500.00	1,508,300,875.00	2,375,163,100.00	1,671,973,486.00	11,912,184,300.00	0.72
1.1.2.	Retribusi daerah	559,755,000.00	1,165,612,800.00	1,707,879,980.00	2,023,528,280.00	1,719,419,280.00	0.27
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.00	1,157,547,610.42	16,500,000.00	0.00	0.00	0.04
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	8,298,135,780.00	9,301,330,016.52	3,394,875,716.00	0.98
1.2.	Dana Perimbangan	386,153,502,100.00	436,654,788,200.31	448,370,878,361.00	441,177,540,829.00	503,252,614,187.00	83.79
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	22,215,502,100.00	33,682,980,000.00	53,424,114,361.00	35,832,848,829.00	37,796,590,187.00	6.92
1.2.2.	Dana alokasi umum	319,568,000,000.00	349,350,700,000.00	346,879,764,000.00	358,090,492,000.00	403,595,524,000.00	67.22
1.2.3.	Dana alokasi khusus	44,370,000,000.00	53,621,108,200.31	48,067,000,000.00	47,254,200,000.00	61,860,500,000.00	9.65
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	21,201,550,000.00	34,633,259,000.00	82,088,296,500.00	121,179,470,210.00	116,754,086,020.23	14,21
1.3.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	5,011,550,000.00	7,041,550,000.00	11,858,268,500.00	9,861,352,410.00	9,861,352,410.00	1.65
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15,000,000,000.00	13,416,210,000.00	54,152,028,000.00	62,810,959,000.00	22,324,366,810.23	6.34
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,190,000,000.00	1,328,000,000.00	12,578,000,000.00	14,063,000,000.00	26,659,000,000.00	2.11
1.3.4	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	0.00	3,750,372,600.00	3,500,000,000.00	8,889,825,000.00	39,715,796,000.00	2.11
1.3.5.	Dana Pasca Bencana Alam	0.00	9,097,126,400.00	0.00	7,360,763,000.00	0.00	0.62
1.3.6.	Tunjangan Profesi Pendidik/Guru	0.00	0.00	0.00	8,993,170,800.00	8,993,170,800.00	0.68
1.3.7.	Dana Tambahan Penghasilan Guru	0.00	0.00	0.00	9,200,400,000.00	9,200,400,000.00	0.70
	Total Pendapatan	411,365,727,600.00	477,619,508,485.73	542,856,853,721.00	575,353,842,821.52	637,033,179,503.23	20.00

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dari tahun 2007-2011 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu sebesar 2%. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 637,033,179,503.23 atau 90,32 %, kalau dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2010 yaitu 575,353,842,821.52 atau 94,35%. Kenaikan tertinggi pada tahun 2011 pada sektor dana perimbangan sebesar 503,252,614,187.00 atau 83.79 %.

Besarnya dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah dari satu sisi bernilai positif, tetapi dari sisi lain bernilai negatif. Program pembangunan yang dijalankan masih bertumpu dari bantuan dana pusat, baik DAU maupun DAK. Besarnya dana yang diperoleh dari pusat untuk membiayai pembangunan daerah ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2011 hanya naik sebesar 4,029,647,513.48 kalau dibandingkan dari pendapatan tahun 2010.

Melihat kondisi pendapatan yang demikian, maka dalam APBD tahun 2012-2016 berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal. Potensi untuk meningkatkan pendapatan sangat memungkinkan. Dewasa ini kebijakan nasional melalui otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya bagi daerah untuk meningkatkan investasi daerah melalui kerjasama dengan para investor, baik investor dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri. Selain adanya kesempatan yang luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tantangan ke depan, baik secara nasional maupun regional juga sangat besar. Masih minimnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat, dalam bentuk dana perimbangan, dapat mengancam kelangsungan pembangunan di Kabupaten Landak. Untuk itu, memang harus ada upaya yang serius dan sistematis untuk meningkatkan pendapat asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang semakin kompleks. Selain itu, tantangan regional antara lain berupa masih selektifnya keinginan pihak negara-negara luar untuk menanamkan modalnya dan ancaman serius krisis ekonomi dunia di mana terjadi turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Ancaman krisis global ini dapat menyebabkan banyak para investor enggan menanamkan modalnya. Dampaknya tentu terjadi pada penurunan pendapatan asli daerah yang sangat diharapkan dari sektor industri dan penanaman modal asing.

Tantangan-tantangan nasional dan regional ini sangat berdampak bagi pendapatan daerah untuk membiayai pembangunannya. Pendapatan daerah yang sangat kecil sementara bantuan dana perimbangan terbatas pada akhirnya menyebabkan banyak program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan tidak berjalannya program pembangunan, maka upaya serius untuk menanggulangi isu-isu pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi terkendala.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2010
Kabupaten Landak

No.	Uraian	Rata-Rata Per- tumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas di Kas Daerah	0,68
1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,29
1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
1.1.4.	Biaya di bayar dimuka	
1.1.5.	Piutang Pajak	0,01
1.1.6.	Piutang Distribusi	-
1.1.7.	Piutang Lainnya	0,11
1.1.8.	Persediaan	0,22
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1.	Investasi Non Permanen	0,11
1.2.2.	Investasi Permanen	0,53
1.3.	ASET TETAP	
1.3.1.	Tanah	3,11
1.3.2.	Peralatan dan mesin	6,37
1.3.3.	Gedung dan bangunan	32,53
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	50,45
1.3.5.	Aset tetap lainnya	0,91
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1,78
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	0,00
1.3.	ASET LAINNYA	
1.3.1.	Aset tak berwujud	0,25
1.3.2.	Aset Lain-lain	2,66
	JUMLAH ASET DAERAH	5,88
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,35
2.1.2.	Utang Bunga	0,13
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	3,40
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	0,62
3.1.2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
3.1.3.	Cadangan piutang	0,12
3.1.4.	Cadangan persediaan	0,35
3.1.5.	Ansuransi yang masih berlaku	
3.1.6.	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang Jangka Pendek	-3,53
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,64
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	95,02
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	2,90
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9,09

Rata-rata pertumbuhan aset daerah pada tahun 2010 berkisar 5,88 % dari keseluruhan aset daerah. Aset yang tertinggi dimiliki Kabupaten Landak yaitu berupa jalan, irigasi dan jaringan mencapai 50,54%, menyusul aset berupa gedung dan bangunan sebesar 32,53%. Sementara aset berupa Kas Daerah pertumbuhannya sebesar 0,68%. Adapun investasi jangka panjang yang sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan ke depan pertumbuhannya sebesar 0,64%. Melihat kondisi neraca daerah yang demikian, maka dalam kinerja pemerintah daerah tahun 2011-2016 akan mengupayakan secara maksimal peningkatan neraca daerah.

Sangat disadari kondisi neraca daerah yang demikian masih sangat sulit untuk menanggulangi isu dan masalah pembangunan di Kabupaten Landak yaitu masih tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran dan masih banyaknya sarana dan prasarana yang harus dibangun. Hal ini sangat disadari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang masih berusia 12 tahun.

Selain tantangan daerah berupa pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pembangunan sarana dan prasarana, maka neraca daerah yang demikian akan mengalami tantangan pula dari nasional maupun regional. Tantangan nasional yang dihadapi daerah yaitu berupa ketidakmampuan daerah untuk menjawab isu-isu secara nasional berupa perimbangan keuangan, pengentasan kemiskinan maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Dari regional tantangan yang dihadapi daerah berupa ketidakmampuan daerah untuk mandatkan investor luar yang terlebih dahulu membutuhkan sarana dan prasarana penunjang investasi.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Landak

No	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Rasio lancar (current ratio)	4,15	0,99	0,37
2	Rasio cepat (quick ratio)	3,80	0,01	0,28
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,01	0,02	0,04
4	Rasio hutang terhadap modal	0,01	0,02	0,04

Rasio likuiditas berupa rasio lancar dan rasio quick adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari beberapa rasio yang dimunculkan, maka terlihat adanya penurunan dari tahun 2008-2009. Rasio lancar yaitu persentase pertumbuhan setelah membandingkan antara aktiva lancar dari neraca daerah dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2008 sebesar 4,15% mengalami penurunan tahun 2009 dan 2010 yaitu masing-masing 0,99 dan 0,37. Demikian juga pada rasio cepat (quick rasio) setelah membandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek mengalami penurunan pada tahun 2010, Rasio quick tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 3,80% dan mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 yaitu masing-masing 0,01% dan 0,28%.

Sementara rasio solvabilitas berupa rasio total hutang terhadap total aset daerah dan rasio hutang terhadap modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Pada tahun 2008 rasio total hutang terhadap aset sebesar 0,001%, namun pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dan 0,004.

Sangat disadari masih rendahnya kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan kondisi rasio likuiditas maupun solvabilitas yang demikian maka dapat dikatakan bahwa harus ada usaha yang serius dan sistematis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Dengan terpenuhinya kewajiban jangka pendek, maka dapat memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dipelbagai sektor. Kewajiban jangka pendek yang merupakan hutang daerah setiap tahunnya menjadi perhatian serius agar hutang daerah tidak terus menumpuk. Selain itu dengan terpenuhinya kewajiban-kewajiban jangka pendek, maka aktiva lancar neraca daerah semakin memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam memenuhi kebutuhan daerah.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Proporsi pengelolaan keuangan daerah merupakan merupakan hal penting untuk melihat sejauh mana rasionalnya pengelolaan keuangan yang dilakukan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya perimbangan keuangan atau terjadinya defisit dalam anggaran biaya pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Landak masa lalu selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2009-2011.

Adapun gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan sebagai berikut:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Landak tahun 2009-2011 mengalami penurunan yang berarti. Proporsi pemenuhan aparatur tahun 2009 setelah membandingkan dengan total keseluruhan pengeluaran sebesar 59,50%. Pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 54,18 dari total keseluruhan anggaran, dan kembali turun pada tahun 2011 menjadi 43,93%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Landak

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun Anggaran 2009	337,094,682,119.46	566,533,609,216.00	59,50
2	Tahun Anggaran 2010	347,871,646,230.00	642,038,726,902.46	54,18
3	Tahun Anggaran 2011	295,185,738,079.00	671,951,510,338.36	43,93

Berdasarkan tabel 3.4. di atas walaupun mengalami penurunan yang sangat berarti, namun proporsi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur masih cukup tinggi dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Hal ini disebabkan masih kecilnya pendapatan daerah, sementara pengeluaran yang dilakukan tinggi. Untuk itu sangat disadari pemerintah daerah Kabupaten Landak

bagaimana pendapatan daerah ke depan harus lebih tinggi, sehingga dengan anggaran pemenuhan kebutuhan aparatatur yang tetap atau naik tetapi persentasenya lebih kecil.

Dengan masih tingginya pemenuhan kebutuhan aparatatur, terutama dalam biaya gaji, maka berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran bidang lainnya seperti belanja daerah untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa menjadi lebih kecil. Dengan kecilnya belanja modal dan belanja barang serta jasa menyebabkan kebutuhan pelayanan publik menjadi kecil pula.

Tantangan lain yang akan dihadapi baik secara nasional maupun regional adalah bagaimana daerah meningkatkan kapasitas aparatatur dalam menjawab berbagai tantangan yang terjadi ditingkat nasional maupun regional. Anggaran biaya aparatatur yang di dalamnya termasuk biaya pendidikan untuk meningkatkan kapasitas aparatatur harus dimanfaatkan sebesar-besarnya sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi yang terjadi di segala bidang tersebut.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realiasi pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5. Pada tahun 2009 pendapatan daerah sebesar 542,856,853,721.00. Demikian juga mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 575,353,842,821.52 dan 637,033,179,503.23. Namun dibandingkan besarnya belanja daerah, maka terjadi defisit anggarannya pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 66,729,884,080.94 dan 34,918,330,835.13. Hal ini terjadi karena masih kecilnya pendapatan daerah dibandingkan belanja daerah yang harus dikeluarkan pada tahun 2010 dan 2011. Secara rinci defisit riil anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.5. di bawah.

Tabel 3.5.
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Landak

NO	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	542,856,853,721.00	575,353,842,821.52	637,033,179,503.23
2	Belanja Daerah	566,533,609,216.00	620,583,726,902.46	609,951,510,338.36
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	21,500,000,000.00	62,000,000,000.00
	Defisit riil	(23,676,755,495.00)	(66,729,884,080.94)	(34,918,330,835.13)

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Landak pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. di bawah. Pada tahun 2009 penutup defisit riil melalui SiLPA sebesar 58,82%, kemudian disusul proporsi penutup defisit tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 11,00% dan 30,18%. Selain itu penutup riil defisit anggaran juga dilakukan melalui pinjaman daerah pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 25% dan 75% dari total anggaran. anggaran sebelumnya dan SiLPA tahun berkenan.

Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Landak

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	58,82	11,00	30,18
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	25,00	75,00	0,00
3	Penerimaan Piutang Daerah	100,00	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenan	(242.04)	33.86	308.18

Realisasi SiLPA perhitungan anggaran Kabupaten Landak tahun 2008, 2009 dan 2010 setelah melihat komposisi APBD dan Neraca Daerah terlihat pada Tabel 3.7. di bawah. Pada tahun 2008 tidak terdapat SiLPA dalam kinerja APBD yang berjalan. Namun pada tahun 2009 terdapat SiLPA Kabupaten Landak sebesar 18,492,299,471.34 atau 112,26%. Pada tahun 2010 SiLPA mengalami defisit sebesar 2.587.112.643,00. atau -16,26%. Hal ini jika pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari persentase penerimaan SiLPA pada tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,066,217,574.58 atau 63,36%. Namun pada tahun 2010 pelampauan penerimaan PAD kembali turun kalau dibandingkan dengan presentase penerimaan SiLPA yaitu sebesar 599,152,922.52 atau (23.16).

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Landak

No.	Uraian	2008		2009		2010	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA		0.00	18,492,299,471.34	112,26	(2,587,112,643.00)	(16,26)
2	Pelampauan penerimaan PAD	2,320,785,785.42	-	6,066,217,574.58	32.80	599,152,922.52	(23.16)
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	50,501,286,100.31	-	11,716,090,160.69	63.36	(7,193,337,532.00)	278.05
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	13,431,709,000.00	-	47,455,037,500.00	256.62	39,091,173,710.00	(1,511.00)
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	8,751,178,274.85	-	5,382,380,738.94	29.11	6,194,500,443.17	(239.44)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam mewujudkan visi, misi, isu, sasaran strategis dan prioritas pembangunan sangat dibutuhkan dana yang cukup. Namun dalam pemanfaatan dana yang tersedia sangat pula dibutuhkan kebijakan anggaran, sehingga dengan dana yang tersedia visi, misi, isu, sasaran strategis dan prioritas pembangunan dapat terwujud dan tidak keluar dari kebijakan yang telah disusun.

Dalam menyusun kerangka pendanaan 2012-2016 sangat dibutuhkan analisis terhadap pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang akan dilakukan. Selain itu, proyeksi anggaran 2012-2016 harus melihat kapasitas riil kemampuan pendanaan dan bagaimana rencana dalam menggunakan kapasitas riil yang ada. Berikut akan disajikan analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi anggaran, kapasitas

riil dan rencana menggunakan kapasitas riil kemampuan pendanaan dalam pembangunan Kabupaten Landak 2012-2016.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Komponen pengeluaran periodik wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan pengeluaran. Komponen belanja tidak langsung, yang menjadi wajib, mengikat dan prioritas utama, terdiri dari belanja gaji, tunjangan dan belanja bunga. Adapun komponen belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedang komponen pembiayaan pengeluaran terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Dari Tabel 3.8. dapat dilihat bahwa proyeksi total anggaran wajib, mengikat dan prioritas utama untuk 2012 sebesar Rp. 597,256,581,707.17. Pengeluaran ini naik 2% dibandingkan tahun 2011. Kecilnya angka kenaikan pengeluaran dilakukan dalam upaya pemerintah Kabupaten Landak menekan angka pengeluaran untuk menuju anggaran yang berimbang tahun 2012-2016.

Dari Tabel 3.8. terlihat pula bahwa belanja tidak langsung sebesar 38,38%. Pengeluaran belanja tidak langsung lebih kecil dari dari belanja langsung yaitu 52,23%. Kebijakan ini dilakukan guna memberikan pelayanan publik yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga visi, misi dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Selain itu pengeluaran periodik wajib, mengikat serta prioritas utama juga memberikan proporsi yang cukup besar untuk pembayaran pokok utang yaitu sebesar Rp. 63.000.000.000,00. Hal ini dilakukan guna mengurangi beban pemerintah daerah Kabupaten Landak serta menekan defisit anggaran dalam tahun yang berjalan.

Tabel 3.8.
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Landak

No	Uraian	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja Tidak Langsung	266.020.775.959,43	38,38
	Belanja Gaji dan Tunjangan	276.158.126.401,94	39,84
	Belanja Bunga	2.530.305.555,56	0,37
	Belanja Langsung	362.058.014.827,86	52,23
	Belanja Barang Dan Jasa	162.785.875.951,86	23,48

No	Uraian	2012 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja Modal	199.272.138.876,00	28,75
	Pembiayaan Pengeluaran	65.100.000.000,00	9,39
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	0.30
	Pembayaran Pokok Utang	63.000.000.000,00	11,31
	TOTAL	693.178.790.787,29	100.00

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi pendapatan, proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama diambil setelah mencermati proyeksi data-data APBD 2007-2011. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.9. berikut:

Tabel 3.9.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pendapatan					
	Pendapah Daerahan Pemerintah	764.439.815.403,88	840.883.796.944,27	924.972.176.638,70	1.109.966.611.966,43	1.331.959.934.359,72
	Swasta	150.000.000.000,00	165.000.000.000,00	181.500.000.000,00	403.493.322.393,29	484.191.986.871,94
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-				
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	33.444.241.923,92	36.788.666.116,31	40.467.532.727,94	48.561.039.273,53	58.273.247.128,24
	Total penerimaan	947.884.057.328	1.042.672.463.060,58	1.146.939.709.366,64	1.562.020.973.633,25	1.874.425.168.359,90
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	711.158.790.787,29	746.716.730.326,66	784.052.566.842,99	862.457.823.527,29	948.703.605.880,02
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	236.725.266.540,51	295.955.732.733,93	362.887.142.523,65	699.563.150.105,97	925.721.562.479,89

Dari proyeksi APBD 2007-2011, maka proyeksi pendapatan tahun 2012 mengalami kenaikan 20% atau Rp. 947.884.057.328, pendapatan kembali naik masing-masing 10% atau sebesar Rp 1.042.672.463.060,58 dan Rp 1.146.939.709.366,64 pada tahun 2013 dan tahun 2014 naik. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 kembali naik masing-masing sebesar 20% atau Rp 1.562.020.973.633,25 dan Rp 1.874.425.168.359,90. Proyeksi kenaikan pendapatan ini, selain pendapatan rutin dari pajak, penerimaan dari APBN, juga diharapkan ditunjang pendapatan dari sektor swasta.

Dalam proyeksi 2012-2016 ini diproyeksi pula SiLPA masing-masing mengalami kenaikan 10-20% pada tahun 2012-2016. Dengan demikian proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Landak selama 5 tahun kedepan

berada pada posisi surplus keuangan daerah yaitu sebesar Rp 925.721.562.479,89 pada akhir periode tahun 2016.

Sedangkan untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran yang periodik wajib, mengikat serta prioritas utama mengalami kenaikan fluktuatif antara 5% - 34%. Pada tahun 2012 belanja dan pembiayaan pengeluaran yang periodik wajib, mengikat serta prioritas utama diproyeksikan sebesar Rp 711.158.790.787,29.

Tentunya adanya proyeksi persentase dan besar kecilnya proyeksi kenaikan, serta kemungkinan terjadinya proyeksi surplus kemampuan riil pendanaan pada tahun 2012-2016 didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Landak mencapai 4,76% dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 4,89% (angka proyeksi). Melihat pertumbuhan ekonomi yang terus naik, maka diyakini bahwa pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak diproyeksikan mencapai 5,50%. Keyakinan ini didasari pada kemampuan pemerintah daerah melakukan koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal.
- 2) Pendapatan daerah juga diperoleh dari sektor swasta yang melakukan investasi di Kabupaten Landak. Swasta menyumbangkan antara 15,48%-20,00% dari nilai investasinya untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, rumah dan lainnya. Serta juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Landak yang bekerja di sektor swasta ini.
- 3) Anggaran pembangunan Kabupaten Landak pada akhir masa periode 2007-2011 masih mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp. 34,918,330,835.13. Besarnya defisit riil kemampuan pendanaan daerah ini menyebabkan pemerintah daerah berupaya menutup defisit riil tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
- 4) Proyeksi pendapatan mengalami kenaikan 20% pada tahun 2015-2016 dengan asumsi bahwa usaha-usaha mengerakan ekonomi kerakyatan, investasi dan penghematan anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil.
- 5) Proyeksi belanja langsung yang periodik wajib, mengikat serta prioritas utama yaitu sebesar 52,23%. Proyeksi ini lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung untuk pemenuhan gaji pegawai, tunjangan dan belanja bunga yaitu hanya sebesar 38,38%. Besarnya proyeksi belanja langsung ini diharapkan dapat menjadi daya dukung pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, proyeksi kecilnya kenaikan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan ini dapat dilakukan dengan asumsi tidak terjadi penambahan penerimaan pegawai yang besar pada tahun 2012-2014, sehingga biaya-biaya pemenuhan kebutuhan aparatur dapat ditekan maksimal.

Proyeksi-proyeksi kenaikan pendapatan dan belanja serta terjadinya surplus kemampuan riil pendanaan pemerintah daerah Kabupaten Landak berdasarkan asumsi-asumsi di atas sangat memungkinkan terjadi dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Landak. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Mengerakan industrir hilir maupun industri hulu di Kabupaten Landak dengan cara mengundang para investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- 2) Membangun industriliasasi pada kawasan centra industri di Kabupaten Landak untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mewujudkan kemampuan daerah membiaya pembangunannya sendiri.

- 3) Mengerakan pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha daerah yang sah seperti PDAM, PLTA dan Parawisata.
- 4) Menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang ada dari dalam maupun luar negeri.
- 5) Melakukan kebijakan penghematan belanja dan pengeluaran pembiayaan sekecil mungkin, sehingga terjadi surplus anggaran pada tahun 2012-2016.
- 6) Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan ke depan. Dengan kemampuan yang memadai menjawab berbagai tantangan aparatur pemerintah daerah dapat dengan mudah meningkatkan pendapatan daerah dan dengan demikian dapat pula memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- 7) Menggerakkan potensi pembiayaan pembangunan dari pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Landak tahun 2012-2016 bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk program/kegiatan tahun 2012-2016 berdasarkan skala prioritas. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, pemerintah Kabupaten Landak mengalokasikan dana ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Dalam RPJMD ini alokasi anggaran terbagi atas 3 prioritas yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Di mana Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun uraian pembagian ketiga prioritas tersebut sebagai berikut:

1) Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kabupaten Landak sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

3) Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana

pada prioritas III ini memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berikut program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak 2012-2016 sebagai bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah sebagai mana terlihat pada Tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Landak

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	236.725.266.540,51	248.561.529.867,54	260.989.606.360,91	287.088.566.997,00	315.797.423.696,70
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	387.551.068.321,86	406.928.621.737,95	427.275.052.824,85	470.002.558.107,34	517.002.813.918,07
II.b	Pembentukan dana cadangan	6.688.848.384,78	7.023.290.804,02	7.374.455.344,22	8.111.900.878,64	8.923.090.966,51
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	362.058.014.827,86	413.595.259.897,96	429.039.306.853,02	456.569.863.535,13	499.247.005.096,53
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	65.100.000.000,00	68.355.000.000,00	71.772.750.000,00	78.950.025.000,00	86.845.027.500,00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	97.281.901.878,78	102.145.996.972,72	107.253.296.821,36	117.978.626.503,49	129.776.489.153,84
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	139.443.364.661,73	146.415.532.894,82	153.736.309.539,56	169.109.940.493,51	186.020.934.542,86
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II		-	-	-	-
III.a	Belanja Tidak Langsung	328.633.681.303,60	345.065.365.368,78	362.318.633.637,22	398.550.497.000,94	438.405.546.701,04
	Dikurangi:		-	-	-	-
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	304.023.743.953,63	319.224.931.151,31	335.186.177.708,88	368.704.795.479,77	405.575.275.027,74
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	24.609.937.349,97	25.840.434.217,47	27.132.455.928,34	29.845.701.521,18	32.830.271.673,29
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	114.833.427.311,76	120.575.098.677,35	126.603.853.611,22	139.264.238.972,34	153.190.662.869,57
	Rencana Alokasi Pengeluaran Perioritas III		-	-	-	-
	Tambahan penghasilan PNS	25.493.053.494,00	26.767.706.168,70	28.106.091.477,14	30.916.700.624,85	34.008.370.687,33
IVb	Belanja hibah	30.615.292.143,96	32.146.056.751,16	33.753.359.588,72	37.128.695.547,59	40.841.565.102,35
IVc	Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	2.520.073.200,00	2.646.076.860,00	2.778.380.703,00	3.056.218.773,30	3.361.840.650,63

IVd	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pemerintah Desa	28.077.540.000,00	29.481.417.000,00	30.955.487.850,00	34.051.036.635,00	37.456.140.298,50
Ive	Belanja tidak terduga	1.400.000.000,21	1.470.000.000,22	1.543.500.000,23	1.697.850.000,25	1.867.635.000,28
IV	Total Rencana Pengeluaran Prioritas III	88.105.958.838,17	92.511.256.780,08	97.136.819.619,08	106.850.501.580,99	117.535.551.739,09
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-II-III-IV)	26.727.468.473,59	28.063.841.897,27	29.467.033.992,13	32.413.737.391,35	35.655.111.130,48

Dari Tabel 3.10. terlihat rencana anggaran berdasarkan kemampuan riil pendanaan pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2012-2016 diproyeksikan mengalami perkembangan setiap tahunnya masing-masing sebesar Rp. 236.725.266.540,51 pada tahun 2012, Rp. 248.561.529.867,54 pada tahun 2013, Rp. 260.989.606.360,91 pada tahun 2014, Rp. 287.088.566.997,00 pada tahun 2015 dan Rp 315.797.423.696,70 pada tahun 2016. Demikian juga, Surplus Anggaran diproyeksikan terus terjadi pada setiap tahunnya yaitu masing-masing sebesar Rp. 26.727.468.473,59 pada tahun 2012, Rp. 28.063.841.897,27 pada tahun 2013, Rp 29.467.033.992,13 pada tahun 2014, Rp. 32.413.737.391,35 pada tahun 2015, dan Rp 35.655.111.130,48 pada tahun 2016.

Terjadinya surplus anggaran dikarenakan sudah terjadi perimbangan keuangan antara pembiayaan anggaran untuk belanja langsung dan belanja tak langsung. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan melalui pengembangan industriisasi, gerakan ekonomi rakyat, pengembangan industri hilir maupun hulu berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil.

Alokasi belanja langsung dan pembentukan dana cadangan pada tahun 2012 sebesar Rp. 387.551.068.321,86 dan Rp. 6.688.848.384,78. Kalau anggaran belanja langsung dan pembentukan cadangan ini dikurangi dengan anggaran Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka yaitu masing masing sebesar Rp 362.058.014.827,86 dan Rp 65.100.000.000,00, maka total pengeluaran untuk program prioritas I tahun 2012 ini sebesar Rp 97.281.901.878,78. Sisa kapasitas riil pendanaan sebesar Rp 139.443.364.661,73.

Adapun rencana alokasi rencana anggaran untuk pemenuhan program pada Prioritas II tahun 2012 mencapai Rp. 24.609.937.349,97. Apabila prioritas II dikurangi dengan dana yang tersisa dari kapasitas riil pendanaan, maka masih tersisa anggaran pendanaan sebesar Rp. 114.833.427.311,76.

Rencana alokasi dana untuk pemenuhan Prioritas III sebesar Rp. 88.105.958.838,17. Apabila sisa anggaran Prioritas I dan Priotas II ini dikurangi dengan pembiayaan untuk Prioritas III, maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 26.727.468.473,59 pada tahun 2012. Surplus diproyeksikan terus naik setiap tahunnya sampai pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 35.655.111.130,48.

Pendanaan pembangunan Kabupaten Landak diproyeksikan mengalami surplus pada tahun 2012-2016. Surplus ini terjadinya disebabkan usaha-usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Landak menuai hasil sebagaimana ditargetkan.

Kerangka pendanaan yang diproyeksikan pemerintah Kabupaten Landak tahun 2012-2016 memang membutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari setiap SKPD. Potensi untuk meningkatkan pendapatan masih terbuka luas. Berbagai pihak, baik dari nasional maupun regional, yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Landak cukup tinggi. Namun untuk dapat mengertakan potensi dari luar dibutuhkan infrastruktur yang menunjang. Untuk itulah pada

tahun-tahun awal rencana kerangka pendanaan diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Selain masih terbuka luasnya potensi untuk meningkatkan pendapatan, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Landak juga tidak kecil. Ancaman krisis finansial global sewaktu-waktu dapat mempengaruhi rencana kerangka pendanaan yang telah direncanakan. Ancaman krisis global dapat menyebabkan inflasi Kabupaten Landak yang tinggi, sehingga konsekuensinya akan mempengaruhi nilai besaran dari anggaran yang telah direncanakan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, dalam melakukan perumusan isu strategis ini dilakukan terlebih dahulu mencermati berbagai fakta dan informasi mengenai kinerja Pemerintahan Kabupaten Landak 5 tahun yang lalu. Fakta dan informasi ini diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam merumuskan isu strategis ini dicermati pula visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam janka menengah.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal Kabupaten Landak dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak dalam lima tahun mendatang (2012 - 2016).

1. Analisa Peluang Daerah

- a. Tersedianya dana-dana tugas pembantuan, desentralisasi serta dana dekonsentrasi dalam bentuk program-program pembangunan yang dipadukan dengan pendapatan asli daerah dapat menjadi modal dalam mempercepat pembangunan sehingga pengentasan kemiskinan dapat terwujud.
- b. Besarnya minat investor dalam dan luar negeri dengan menyediakan dana, ketrampilan, dan teknologi yang dimiliki untuk mengolah sumberdaya alam.
- c. Perluasan pasar regional dan internasional untuk meningkatkan kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan terutama komoditi unggulan.
- d. Perluasan jaringan dan kerjasama antar wilayah di berbagai bidang

pembangunan berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

- e. Termasuk dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- f. Adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pembangunan daerah.

2. Analisa Ancaman Daerah

- a. Para investor yang kurang memberdayakan masyarakat lokal dan tidak sesuai dengan rencana investasi menyebabkan terjadinya konflik dengan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- b. Pangsa pasar internasional yang tidak resmi akan mendominasi pasar lokal dan pasar dalam negeri akan berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha.
- c. Perubahan regulasi yang kerap kali terjadi.
- d. Krisis internasional yang turut berdampak pada rendahnya nilai tukar rupiah dipasaran.

4.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal Kabupaten Landak dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak dalam lima tahun mendatang (2012-2016).

1. Analisa Kekuatan Daerah

- a. Potensi pengembangan sangat besar yang berbasis kepada sumber daya alam.
- b. Lahan yang cukup tersedia untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri.
- c. Penduduk yang memiliki karakteristik dan dapat menerima perubahan dan mudah berinteraksi dengan pihak luar.
- d. Kondisi kehidupan politik dan keamanan yang stabil sebagai jaminan keberlangsungan demokratisasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta desentralisasi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- e. Kelembagaan daerah yang sudah memadai.
- f. Keinginan yang kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk membangun wilayahnya, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

2. Analisa Kelemahan Daerah

- a. Pengelolaan sumber daya alam belum memberikan dampak yang signifikan baik bagi kemajuan daerah maupun tingkat kesejahteraan penduduk.
- b. Pembangunan yang dilakukan secara kurang bijak terutama pembangunan yang mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup serius pada beberapa kawasan.

- c. Keterbatasan jaringan infrastruktur menyebabkan masih banyak daerah terisolir dan hasil pembangunan belum dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
- d. Rendahnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai menyebabkan IPM Landak masih rendah sebesar 67,55 dan menduduki urutan ke 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
- e. Kondisi masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dalam mengembangkan usaha dan kurang memiliki semangat wirausaha serta rendahnya partisipasi dalam ekonomi pasar sehingga kalah dalam bersaing.
- f. Kepekaan para birokrat yang masih rendah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan.
- g. Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dengan masyarakat sipil yang memerlukan waktu yang panjang, bertahap, dan tidak pasti menimbulkan dampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan cenderung mengaburkan aspirasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan dampak negatif berupa inkonsistensi produk peraturan daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Isu pemilukada tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan termasuk diantaranya konflik batas antarwilayah administrasi.
- i. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah karena belum optimalnya penggalan sumber-sumber PAD

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam lima tahun (2012-2016) mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran yang merupakan konsekuensi logis dari belumnya tumbuhnya ekonomi secara baik, belum optimalnya penciptaan lapangan kerja dan usaha-usaha kewirausahaan dan belum maksimalnya pelayanan-pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, energi dan air bersih.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang merupakan konsekuensi tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita di Kabupaten Landak.
3. Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan) yang ditunjukkan dengan belum optimalnya industri pengolahan komoditas unggulan sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan di Kabupaten Landak.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan irigasi di setiap kecamatan, terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antara desa dan antara kota kecamatan, yang menjadi penggerak utama pengembangan ekonomi, barang dan jasa.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan listrik.
6. Masih rendahnya kinerja BUMD (PDAM, Bank Kalbar Cabang Landak) untuk secara optimal membiayai pembangunan daerah sehingga terciptanya anggaran darah yang berimbang.
7. Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik yang ditandai masih

kurangnya integritas dan kinerja pejabat dalam koridor otonomi daerah guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. V I S I

Dengan memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang dan mengacu pada arahan RPJPD Landak Tahun 2007-2027 serta mempertimbangkan cerminan hati sanubari rakyat Landak untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, maka rumusan Visi Pembangunan Landak Tahun 2012 - 2016 adalah :

“ Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing ”

Cerdas adalah kemampuan olah pikir, olah batin, olah raga dan olah rasa masyarakat Kabupaten Landak, sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki sikap takut akan Tuhan (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME), sehat, dan sejahtera serta berkebudayaan. Dengan kecerdasan ini masyarakat Kabupaten Landak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerahnya.

Berdaya Saing adalah keunggulan (advantages) sumber daya manusia Kabupaten Landak dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

5.2. M I S I

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Landak, maka misi pembangunan Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral.
3. Mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Mewujudkan pembangunan prasarana wilayah.
5. Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan budaya.
6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari misi pertama ini yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkapasitas, kreatif dan inovatif guna membangun Kabupaten Landak yang adil dan sejahtera, dengan sasaran:

- 1) Tamatan S1 Jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan kebutuhan diangkat menjadi tenaga pendidik di Kabupaten Landak.
 - 2) Para Guru SD dan SMP berkualitas, berkapasitas, kreatif dan inovatif dalam memberikan pendidikan kepada para peserta didik.
 - 3) Siswa-siswi PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK memiliki sekolah, ruang kelas, perpustakaan dan perlengkapan sekolah lainnya dalam kondisi baik.
 - 4) Kepsek dan Guru SD memiliki perumahan yang layak huni.
 - 5) Masyarakat yang belum melek huruf yang berada di pedesaan dan terpencil yang memerlukan layanan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Landak.
 - 6) Beasiswa dikhususkan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu dari mulai SD sampai dengan tahap pendidikan melanjutkan S3.
 - 7) Kaum muda Kabupaten Landak yang berusia antara 15 tahun sampai usia 45 tahun memiliki mentalitas enterpreniurship untuk berwirausahaan, tangguh, penuh percaya diri, religius, bermoral, menghargai dan menghormati adat istiadat, seni budaya serta kearifan local.
 - 8) Masyarakat yang masih buta aksara antara umur 15 tahun ke atas sampai dengan usia 45 tahun, sehingga memiliki daya kritis.
 - 9) Siswa-siswi dari mulai sekolah dasar sampai tingkat menengah memiliki sikap sportif, tangguh dan percaya diri yang muncul dari dampak kegiatan olah raga yang dilaksanakan.
- b. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang sehat dan sejahtera, dengan sasaran:
- 1) Masyarakat Kabupaten Landak yang sehat dan sejahtera, sehingga berkemampuan membangun Kabupaten Landak secara maksimal.
 - 2) Tenaga-tenaga kesehatan (dokter, bidan, mantri) memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
 - 3) Tamatan sekolah kedokteran sesuai dengan kebutuhan diangkat menjadi tenaga-tenaga kesehatan di Kabupaten Landak.
 - 4) Tamatan sekolah kebidanan sesuai dengan kebutuhan diangkat menjadi tenaga medis di Kabupaten Landak.
 - 5) Ahli-ahli pengobatan tradisional yang telah ikut ambil bagian dalam menyetatkan masyarakat di Kabupaten Landak.
 - 6) Masyarakat Kabupaten Landak yang masih berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 45,50 persen.
 - 7) Sarana dan prasarana medis Rumah Sakit yang berada di Kota Ngabang, Kota dari Kabupaten Landak, yang standard dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
 - 8) Puskesmas dan Polindes di seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Misi Kedua yaitu mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral.

Tujuan dari misi Kedua ini yaitu:

- a. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah menuju pendapatan daerah yang surplus dan berimbang, dengan sasaran:
 - 1) Kawasan industri di Kecamatan Mandor yang mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Landak.
 - 2) Industri kecil dan menengah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
 - 3) Masyarakat Kabupaten Landak di seluruh kecamatan memberikan perhatian besar terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Mewujudkan pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran, dengan sasaran:
 - 1) Masyarakat yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan sebesar 45,50 dapat meningkatkan kehidupannya menjadi masyarakat yang sejahtera.
 - 2) Masyarakat yang saat ini masih menganggur, yang masuk pada kategori usia angka kerja antara 15 tahun- 45 tahun, dapat memperoleh pekerjaan untuk membiayai kehidupannya.
 - 3) Seluruh Keluarga yang ada di Kabupaten Landak terlihat aktif dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.
 - 4) Lembaga keuangan rakyat (CU dan Koperasi) memberikan kontribusi yang besar dalam penyaluran bantuan atau pinjaman modal usaha dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Landak.
- c. Membangun manajemen BUMD dan usaha-usaha lain yang sah, yang berdaya-saing dan kompetitif, dengan sasaran:
 - 1) Para tenaga ahli dalam bidang pengembangan ekonomi dapat memberikan sumbangan pemikiran, membangun manajemen BUMD yang baik dan melakukan usaha-usaha yang dapat mendatangkan investasi di Kabupaten Landak.
 - 2) Kalangan investor yang berminat menanamkan modalnya guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, pengurangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Landak.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan industri melalui koperasi, industri, perdagangan dan UKM, dengan sasaran:
 - 1) Kelembagaan UKM dan koperasi yang memiliki daya saing, sehat dan menguntungkan, sehingga mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Landak.
 - 2) Industri Kecil mampu tumbuh dan berkembang, sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak.
 - 3) Kalangan swasta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Landak.
 - 4) Masyarakat di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu,

dan Kec. Menyuke ikut aktif dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan.

- 5) Bank dan CU memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ingin meningkatkan usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menggalakan industri pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:
- 1) Tempat-tempat wisata di Kec. Air Besar dan beberapa wilayah wisata lainnya menjadi tempat kunjungan wisata, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Masterplan Pariwisata beberapa kawasan wisata air terjun di Kec. Air Besar guna pengembangan lokasi wisata yang berdaya saing, sehingga menjadi daerah kunjungan wisata, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - 3) Kerjasama dengan biro-biro perjalanan untuk meningkatkan kunjungan wisata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 - 4) Kalangan swasta yang berminat mengembangkan pariwisata di Kabupaten Landak, baik dalam bidang perhotelan, restoran dan jasa-jasa pariwisata lainnya.
 - 5) Aparatur pemerintah yang memiliki komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan pariwisata, sehingga Kabupaten Landak menjadi daerah kunjungan wisata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

3. Misi Ketiga yaitu mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,

Tujuan dari misi ketiga ini yaitu :

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, dengan sasaran:
 - 1) Keluarga sejahtera dan Keluarga prasejahtera ikut secara aktif melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, sehingga mampu menjadi Kabupaten Landak sebagai Kabupaten yang sejahtera.
 - 2) Para petani, nelayan dan peternak terlibat aktif mengembangkan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, sehingga tercipta peningkatan pendapatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Landak.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Landak yang masih menganggur, dengan sasaran:
 - 1) Masyarakat Kabupaten Landak berusia 15 tahun ke atas memiliki kesempatan kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
 - 2) Angkatan kerja yang masih menganggur memiliki pekerjaan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

- c. Meningkatkan pertanian, ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan, dan peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian, dengan sasaran:
- 1) Para petani di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo, Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, dan Kec. Menyuke berupaya meningkatkan produksi pertanian dan ketersediaan pangan, sehingga menjadi daerah surplus dalam bidang pertanian di Kabupaten Kalimantan Barat.
 - 2) Kalangan wiraswasta yang bergerak di bidang agro-bisnis dan agro-industry secara aktif ikut mengembangkan dan meningkatkan bidang pertanian di Kabupaten Landak.
- d. Meningkatkan usaha perkebunan guna menciptakan kesejahteraan dan mendukung pembangunan industri, dengan sasaran:
- 1) Masyarakat Kabupaten Landak secara umum berkontribusi meningkatkan usaha-usaha dalam bidang perkebunan dan mendukung pembangunan industri guna menciptakan Kabupaten Landak sebagai produsen hasil-hasil perkebunan di Kalimantan Barat.
 - 2) Para Petani yang merupakan mata pencaharian terbesar di Kabupaten Landak terlibat aktif meningkatkan usaha-usaha perkebunan dalam upaya mendukung industri di Kabupaten Landak, sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.
 - 3) Pelaku agri-bisnis terlibat aktif mengupayakan peningkatan dalam bidang perkebunan, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Reboisasi dalam bentuk penanaman kembali hutan untuk kawasan-kawasan yang dihuni masyarakat berada di sekitar hutan lindung, masyarakat yang tinggal di DAS dan hulu sungai serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir.
- e. Meningkatkan usaha peternakan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tumbuhnya industri peternakan, dengan sasaran:
- 1) Masyarakat Kabupaten Landak ikut ambil bagian secara aktif dalam usaha-usaha peningkatan peternakan dan membangun industri peternakan di Kabupaten Landak sebagai produsen ternak di Kalimantan Barat.
 - 2) Para peternak sapi, babi dan jenis ternak lainnya di Kabupaten Landak berupaya meningkatkan usahanya, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Landak yang sejahtera.
- f. Meningkatkan usaha perikanan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tumbuhnya industri perikanan, dengan sasaran:
- 1) Nelayan yang bergerak dalam bidang perikanan darat dalam bentuk kolam, keramba dan lainnya secara aktif meningkatkan usaha-usahanya guna mewujudkan Kabupaten Landak sebagai produsen ikan darat di Kalimantan Barat.
 - 2) Para pengusaha di bidang perikanan di Kabupaten Landak di Kabupaten Landak berupaya meningkatkan usahanya, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Landak yang sejahtera.
- g. Meningkatkan kapasitas energi guna mendukung industri dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:

- 1) Masyarakat Kabupaten Landak secara umum, dan khususnya masyarakat kabupaten Landak yang belum terpenuhi kebutuhan akan energi listrik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel Unit pelayanan PLTD di Kec. Ngabang, Pahauman, Senakin, Mandor, Kec. Menjalin, Karang, Darit, Banyuke Hulu, Serimbu, yang mampu mensuplai kebutuhan akan listrik bagi masyarakat.
 - 3) Pembangunan PLTMH Mananggar/ PLTA Pade Kembayung di Kec. Air Besar yang mampu memberikan suplai listrik bagi masyarakat di Kabupaten Landak dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
 - 4) Objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik di seluruh wilayah Kab. Landak, sehingga menjadi obyek wisata yang memiliki daya saing dan layak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 5) Pembangunan Gardu Distribusi PLTD di Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke yang mampu memberikan suplai listrik bagi masyarakat, sehingga kebutuhan akan energi listrik dapat terpenuhi.
- h. Meningkatkan kapasitas air bersih guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan sasaran:
- 1) Calon pelanggan PDAM dapat berlangganan air bersih secara aktif, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Landak.
 - 2) Para pelanggan PDAM mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Landak.
 - 3) Staf PDAM yang berkomitment meningkatkan kapasitas air bersih untuk masyarakat melalui pelayanan yang maksimal, sehingga pendapatan daerah melalui PDAM terpenuhi.
 - 4) Masyarakat berada di perkotaan dan di pedesaan memiliki air bersih, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
 - 5) PDAM Kabupaten Landak menjadi produsen air minum untuk kabupaten-kabupaten sekitarnya, sehingga peningkatan pendapatan daerah terwujud.

**4. Misi ke empat yaitu mewujudkan pembangunan prasarana wilayah.
Tujuan dari misi keempat ini yaitu**

- a. Mewujudkan lancarnya arus produksi, barang dan jasa guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan sasaran:
- 1) Semua desa dan kecamatan di Kabupaten Landak memiliki jalan dan jembatan sehingga arus produksi, barang dan jasa menjadi lancar.
 - 2) Pembangunan Jaringan jalan yang menghubungkan antar Kabupaten dan Provinsi: Pal 20-Sei. Ambawang, Jl. Meranti Bentiang, Jl/ Serimbu Muara Ilay, Jl. Serimbu Entikong untuk membuka akses daerah Kabupaten Landak.
 - 3) Pembangunan Jaringan rel kereta api Sosok-Ngabang-Sei. Pinyuh berserta sarana dan prasarannya untuk melancarkan arus produksi, barang dan jasa.

b. Mewujudkan terbukanya daerah-daerah terisolir, pedalaman dan tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:

- 1) Wilayah di Kabupaten Landak yang masih terisolir dan jauh dari akses informasi serta komunikasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Masyarakat di wilayah Kabupaten Landak yang tinggal di pedalaman dan masih tertinggal dalam berbagai bidang transportasi, sehingga mampu mengakses berbagai kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraannya.

5. Misi Kelima yaitu mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan budaya.

Tujuan dari Misi ke lima ini yaitu :

a. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Landak yang berwasasan lingkungan hidup, dengan sasaran:

- 1) Pengimplementasian Rencana Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Landak sehingga program pembangunan dapat terencana dengan baik.
- 2) Areal eks-pertambangan emas di wilayah Mandor dan sekitarnya menjadi kawasan industri (industrial estate) yang ramah lingkungan.
- 3) Sebanyak 156 Desa di Kabupaten Landak terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan, sehingga menjadikan Kabupaten Landak yang ramah lingkungan.
- 4) Kawasan-kawasan pertambangan rakyat yang terorganisir, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.
- 5) Daerah yang berada di wilayah rawan bencana menjadi daerah yang aman dengan melakukan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
- 6) Daerah resapan air dan hutan lindung yang memerlukan penjagaan, sehingga kebutuhan air bersih selalu tersedia di Kabupaten Landak.
- 7) Pengelolaan limbah keluarga maupun pabrik dapat terorganisir dengan baik, sehingga terciptanya lingkungan lestari dan limbah dapat bernilai ekonomis.
- 8) Kawasan Hutan lindung menjadi kawasan yang terjaga kelestariannya, sehingga berkontribusi terhadap pencegahan kerusakan hutan di Indonesia.
- 9) Kawasan suaka alam dan cagar budaya yang memerlukan penyelamatan, sehingga menjadi kawasan yang tetap terjaga kelestariannya.
- 10) Kawasan DAS yang memerlukan pengamanan dari kerusakan lingkungan, sehingga menjadi sumber air bagi masyarakat di sekitarnya.

b. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Landak berwawasan budaya dan kearifan lokal, dengan sasaran:

- 1) Rumah panjang, panyugu, tempat-tempat keramat dan sejenisnya dapat terjaga dengan baik, sehingga generasi muda memiliki eksistensi dalam membangun kabupaten Landak ke depan.

- 2) Masyarakat Adat Kabupaten Landak mampu menjaga budaya dan kearifan lokalnya, sehingga menjadi salah satu landasan dalam pembangunan di Kabupaten Landak.

6. Misi Keenam yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dari misi ke enam ini yaitu:

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, jujur, bertanggung jawab, berintegritas dan akuntabel dengan sasaran:
 - 1) Aparatur pemerintahan memiliki sikap yang demokratis, berkeadilan, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi di kabupaten Landak.
- b. Menerapkan pelayanan publik, sistem informasi terpadu, dan penjamin mutu yang berkualitas dan efisien, dengan sasaran:
 - 1) Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Landak dapat terlayani dengan mudah, cepat dan tepat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
 - 2) Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Landak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga terwujud pemerintahan yang baik.
- c. Membangun kepastian hukum guna menunjang iklim investasi, dengan sasaran:
 - 1) Masyarakat Kabupaten Landak mengetahui hukum dan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga terwujud Kabupaten Landak yang aman bagi iklim investasi.
 - 2) Aparatur pemerintahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kabupaten Landak mengetahui hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Para investor dan kalangan swasta memiliki rasa aman dalam melakukan usahanya di Kabupaten Landak, sehingga terwujud peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Landak.
- d. Membangun perpolitikan di daerah yang kondusif guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, dengan sasaran:
 - 1) Partai-partai politik yang ada di Kabupaten Landak bersama pemerintah daerah bekerjasama menciptakan kondisi perpolitikan yang kondusif, sehingga mampu mewujudkan pembangunan di Kabupaten Landak.
 - 2) Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Landak terlibat aktif dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga tercipta kondisi yang harmonis di Kabupaten Landak.
 - 3) Kalangan perempuan terlibat aktif dalam pembangunan di Kabupaten Landak, sehingga terjadi kesetaraan gender dalam program pembanunan.
 - 4) Masyarakat Kabupaten Landak secara umum memiliki kesadaran yang kritis dalam ikut membangun Kabupaten Landak.

- e. Membangun kondisi keamanan yang kondusif guna menumbuhkan iklim investasi dan pembangunan berjalan dengan lancar, dengan sasaran:
- 1) Para investor yang tertarik menanamkan investasinya di Kabupaten Landak, sehingga mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Landak.
 - 2) Aparatur pemerintah daerah memberikan rasa aman bagi para investor, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud.
 - 3) Masyarakat Kabupaten Landak secara aktif membangun kondisi yang aman guna menumbuhkan iklim berinvestasi dan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan perencanaan komperhensif yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan menuju Landak yang Cerdas, Bermoral, Mandiri dan Berdaya Saing Secara Ekonomi perlu strategi yang mendasar, terencana dan terukur. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Pertama: “Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

6.1.1. Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi pertama, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Melakukan penambahan guru baru.
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik.
- c. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
- d. Memberikan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan dan terpencil.
- e. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dari mulai SD sampai dengan tahap S3.
- f. Melakukan pelatihan-pelatihan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun mentalitas kaum muda sehingga terbentuk kaum muda Landak yang tangguh dan percaya diri,
- g. Melakukan pendidikan non formal atau popular education (Pendidikan Orang Dewasa) yang bertujuan untuk membangun daya kritis masyarakat.
- h. Memberikan pelayanan kesehatan yang standard kepada masyarakat.
- i. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat.

6.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi pertama, yaitu :

- a. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.
- b. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai Kecamatan dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
- d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- e. Peningkatan jumlah tenaga-tenaga medis yang mampu memebrika pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- f. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur/fasilitas kesehatan dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Kedua: “Mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral”

6.2.1.Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi kedua, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Membangun pusat industri di Kecamatan Mandor, yang mampu menyerap income bagi daerah dan menyerap tenaga kerja.
- b. Mengembangkan industri hilir dan hulu yang mampu memanfaatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam.
- c. Memberikan bantuan pengembangan industri kecil dan menengah.
- d. Meningkatkan kemampuan teknologi industri yang dilakukan masyarakat Landak.
- e. Memberikan bantuan guna meningkatkan pendapatan dan daya beli keluarga dengan dengan memperbanyak potensi income (penghasilan) tambahan keluarga melalui usaha-usaha produktif.
- f. Meningkatkan peranan lembaga keuangan rakyat (CU dan Koperasi) melalui sosialisasi dan promosi yang massif serta penyadaran masyarakat untuk pentingnya mengakses lembaga keuangan.
- g. Melakukan penataan kawasan produksi rakyat dan pembentukan modal pada tingkat akar rumput.
- h. Meningkatkan kesempatan kerja dengan cara membuka proyek-projek investasi padat karya, sehingga serapan tenaga kerja menjadi maksimal.

6.2.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi kedua, yaitu :

- a. Penataan kembali sistem perijinan.
- b. Penyediaan lahan bagi wilayah pengembangan industri.
- c. Pengupayaan kepastian hukum bagi para investor.

- d. Peningkatan komitmen aparat pemerintah, BUMD, Swasta dan masyarakat untuk mendukung pengembangan industri.
- e. Penggalangan sumber daya pendanaan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Ketiga: “Mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan”.

6.3.1.Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi ketiga, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan dan daya beli keluarga dengan dengan memperbanyak potensi income (penghasilan) tambahan keluarga melalui usaha-usaha produktif.
- b. Meningkatkan peranan lembaga keuangan rakyat (CU dan Koperasi) melalui sosialisasi dan promosi yang massif serta penyadaran masyarakat produksi rakyat dan pembentukan modal pada tingkat akar rumput untuk membangun ketahanan pangan.
- c. Membangun kawasan industri guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan kesempatan kerja dengan cara membuka proyek-proyek investasi padat karya, sehingga serapan tenaga kerja menjadi maksimal.
- e. Mengembangkan kawasan agro-bisnis terpadu dalam menjadikan kabupaten Landak sebagai lumbung padi di Kalbar,
- f. Mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- g. Memelihara dan menjaga kawasan hutan lindung, DAS dan daerah resapan air lainnya.
- h. Membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata dan daerah-daerah yang belum berlistrik di seluruh wilayah Kab. Landak
- i. Meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di Kabupaten Landak.
- j. Membangun sarana dan prasarana tempat wisata.

6.3.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi ketiga, yaitu :

- a. Pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, para investor dan masyarakat.
- b. Pengembangan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.
- c. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.

- e. Pembangunan kelistrikan khususnya bagi wilayah yang sulit terjangkau jaringan listrik PLN.
- f. Meningkatkan pelayanan PDAM bagi wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih.
- g. Peningkatan usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Pembangunan industri pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Keempat: “Mewujudkan pembangunan prasarana wilayah”.

6.4.1.Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi keempat, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jalan pertanian, pelabuhan, dermaga infrastruktur listrik dan infrastruktur dasar lainnya) baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun keterlibatan swasta dan swadaya masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri, untuk membangun sarana dan prasarana.
- c. Menggerakkan peran swasta dan swadaya dalam membangun sarana transportasi di Kabupaten Landak.

6.4.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi keempat, yaitu :

- a. Peningkatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jalan pertanian, pelabuhan, dermaga infrastruktur listrik dan infrastruktur dasar lainnya) baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun keterlibatan swasta dan peran serta masyarakat.
- b. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
- c. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar-wilayah.
- d. Peningkatan jalan dan jembatan untuk menunjang pembangunan industri dan ekonomi rakyat.

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Kelima: “Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan budaya”.

6.5.1.Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi kelima, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detail tata ruang kabupaten untuk diusulkan sebagai rencana revisi tata ruang.
- b. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan budaya di Kabupaten Landak.
- c. Menangulangi daerah rawan bencana.

6.5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi kelima, yaitu :

- a. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Penanganan dan pengurangan risiko bencana.
- c. Pembangunan wilayah berdasarkan RTWW yang telah tersusun.

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi Keenam: “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik”.

6.6.1. Strategi

Dalam upaya mewujudkan misi keenam, maka strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

- a. Mereformasi birokrasi melalui efektifitas dan efisiensi
- b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- c. Menerapkan sistem disiplin PNS sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 secara ketat, obyektif dan transparan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai alat kerja aparatur
- e. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
- f. Melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik.
- g. Mendorong keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Landak.

6.6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dari misi enam, yaitu :

- a. Koordinasi jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
- b. Koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
- c. Pemantapan dan pengembangan penerapan *E-Gov* (DGS).

- d. Peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.
- e. Peningkatan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan yang termuat dalam RPJMD berisi program-program prioritas yang menjadi acuan bagi SKPD melaksanakan kinerjanya. Dengan program-program prioritas ini indikator yang dan target sasaran dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi.

7.1. Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Pertama yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang :

1. Bidang Pendidikan

- a. Program penambahan guru baru
- b. Program peningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik
- c. Program pembangunan gedung sekolah baru, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- d. Program penambahan ruang sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- e. Program pembangunan perpustakaan sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- f. Program pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- g. Program pemeliharaan rutin berkala ruang sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- h. Program rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- i. Program rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK
- j. Program pembangunan rumah dinas Kepsek dan Guru SD
- k. Program pengadaan meja belajar SD/SMP
- l. Program perlengkapan sekolah SD/SLTP
- m. Program sarana berupa Alat Peraga dan TIK
- n. Program pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan dan terpencil;
- o. Program penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dari mulai SD sampai dengan tahap S3.
- p. Program pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan di segala bidang bagi kaum muda dan membangun mentalitas enterpreniurship untuk berwirausaha.
- q. Program kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun mentalitas kaum muda sehingga terbentuk kaum muda Landak yang tangguh dan percaya diri.
- r. Program kegiatan-kegiatan kerohanian guna membangun masyarakat yang religius dan bermoral.

- s. Program kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat perilaku menjaga, menghargai dan menghormati adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal.
- t. Program pendidikan non formal atau popular education (Pendidikan Orang Dewasa) yang bertujuan untuk membangun daya kritis masyarakat.
- u. Program pengembangan dan manajemen olahraga siswa akan dilaksanakan diseluruh kecamatan

2. Bidang Kesehatan

- a. Program kegiatan-kegiatan untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan lingkungan.
- b. Program pengembangan apotik hidup desa.
- c. Program Lomba Desa Bersih.
- d. Program Pengadaan Puskemas keliling.
- e. Program pembangunan polindes.
- f. Program pembangunan rumah dokter.
- g. Program Peningkatan pembangunan RSUD.
- h. Program pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit.
- i. Program pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.
- j. Pengadaaan tenaga-tenaga dokter.
- k. Program pengadaan tenaga bidan.
- l. Program pengembangan tradisi pengobatan tradisional.
- m. Program pelayanan kesehatan untuk masyarakat berupa Jamkesmas, Jamkesda dan Ansuransi Kesehatan Masyarakat.

3. Bidang Olah Raga

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
- c. Program pembinaan dan pemasyrakatan olahraga.
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

4. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

- a. Program KB.
- b. Program kesehatan reproduksi remaja.
- c. Program pelayanan kontrasepsi.
- d. Program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
- j. Program pengembang model operasional BKB/Posyandu/PADU.

5. Pemberdayaan Perempuan

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan.
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan.
- d. Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

7.2. Misi Kedua yaitu Mewujudkan pembangunan industri yang berbasis agro dan mineral.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang:

1. Bidang Ekonomi

- a. Program pembangunan kawasan industri di Mandor.
- b. Program pengembangan industri hilir dan hulu.
- c. Program bantuan pengembangan industri kecil dan menengah.
- d. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- e. Program bantuan peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga dengan dengan memperbanyak potensi income (penghasilan) tambahan keluarga melalui usaha-usaha produktif.
- f. Program pendidikan non formal untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan keuangan keluarga.
- g. Program peningkat peranan lembaga keuangan rakyat (CU dan Koperasi) melalui sosialisasi dan promosi yang massif serta penyadaran masyarakat untuk pentingnya mengakses lembaga keuangan.
- h. Program penataan kawasan produksi rakyat dan pembentukan modal pada tingkat akar rumput.
- i. Program peningkatan kesempatan kerja dengan cara membuka proyek-proyek investasi padat karya, sehingga serapan tenaga kerja menjadi maksimal.

2. BUMD/PERUSDA

- a. Program pengembangan manajemen BUMD dan usaha-usaha lain yang sah, yang berdaya-saing dan kompetitif, dengan sasaran.
- b. Program peningkatan pendapatan Pendapatam Asli melalui sosialisasi kepada kalangan investor menuju keuangan daerah yang berimbang.
- c. Program restrukturisasi manajemen BUMD guna meningkatkan pelanggan, pelayanan publik dan pendapatan.

3. Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM

- a. Program pengembangan kelembagaan UKM dan koperasi.
- b. Program penciptaan Sentra Industri Kecil.
- c. Program pembangunan pasar modern di Kabupaten Landak kota Ngabang.
- d. Program pembangan pusat pertumbuhan dan perdagangan baru di kecamatan Mandor melalui kerjasama dengan swasta (CSR).
- e. Program pengembangan dan peningkatan kawasan industri.
- f. Program pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di seluruh kecamatan.
- g. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- h. Program peningkatan pusat perdagangan di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- i. Program peningkatan pusat perdagangan skala lokal Kec. Sengah Temila, Kec. Mempawah Hulu, Kec. Menyuke.
- j. Program peningkatan pasar tradisional; Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- k. Program sosialisasi penyediaan fasilitas permodalan kepada UKM dan Koperasi yg terdapat di Bank dan CU.
- l. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
- m. Program perlindungan konsumen dan pengembangan perdagangan.
- n. Program pembinaan pedagang Kaki Lima dan Asongan.
- o. Program pengembangan industri hilir dan hulu.

4. Bidang Pariwisata

- a. Program Pembangunan sarana dan prasarana tempat wisata di Kec. Air Besar.
- b. Program pengembangan industri pariwisata yang berbasis argo dan mineral.
- c. Program fasilitasi event-event budaya yang mendukung pariwisata.
- d. Program sosialisasi pariwisata.
- e. Program penyusunan Masterplan Pariwisata beberapa kawasan wisata air terjun di Kec. Air Besar.
- f. Program kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
- g. Program pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.
- h. Program penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah).
- i. Program promosi Kawasan Wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai *event* promosi memberi kontribusi pada pemasasukan kas daerah.
- j. Program pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.

- k. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
- l. Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan.

5. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

- a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
- c. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.
- d. Program peningkatan pelayanan akta perijinan.
- e. Program peningkatan pelayanan perijinan di bidang perijinan tertentu.

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Program pengembangan data /informasi.
- b. Program kerjasama pembangunan.
- c. Program pengembangan wilayah perbatasan.
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- e. Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar.
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Program perencanaan pembangunan daerah.
- h. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
- i. Program perencanaan social dan budaya.
- j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
- k. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- l. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
- m. Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
- n. Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- o. Program Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi.
- p. Program Koordinasi Pengendalian Tata Ruang.

7. Bidang Pendapatan Daerah

- a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD.
- b. Program pembuatan Peraturan daerah yang dapat meningkatkan PAD.
- c. Program sosialisasi peningkatan PAD.

7.3. Misi Ketiga yaitu Mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat berkelanjutan melalui pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang:

1. Bidang Pertanian

- a. Program pengembangan kawasan Strategis kabupaten (agro-bisnis) terpadu di Senakin Komplek, Sompak Komplek, Sebangki Komplek dalam menjadikan kabupaten landak sebagai lumbung padi di Kalbar.
- b. Program pembukaan sawah baru untuk menjadikan Kabupaten Landak sebagai penghasil beras terbesar di Kalbar.
- c. Program intensifikasi pertanian.
- d. Program pengembangan produk unggulan pertanian.
- e. Program peningkatan agri-bisnis yang sesuai dengan potensi agrikultur wilayah dan mengembangkan potensi agro-industry melalui penetapan kawasan-kawasan andalan produksi.
- f. Program penyediaan bibit-bibit untuk pengembangan agri-bisnis dan pertanian guna peningkatan pendapatan.
- g. Program peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan dan pembangunan mesin perontok padi dan mesin bajak petani.
- h. Program peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan secara optimal dan perbaikan kesuburan tanah dengan pemanfaatan pupuk organik/pengembangan SRI.
- i. Program peningkatan pendapatan petani perlu dikembangkan kualitas padi hibrida bersertifikat.
- j. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigáis.
- k. Program pembangunan pengolahan padi di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- l. Program pembangunan fasilitas pembenihan padi di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- m. Program pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- n. Program penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.
- o. Program Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Bidang Perkebunan

- a. Program Perluasan pengembangan perkebunan rakyat meliputi perkebunan karet, sengon dan perkebunan rakyat lainnya.
- b. Program Pelatihan bagi petani/pelaku agribisnis
- c. Program Pengembangan perbenihan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun entris karet
- d. Program pembuatan kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah-wilayah perkebunan.

3. Bidang Kehutanan

- a. Program pengembangan usaha kehutanan.

- b. Program pembinaan usaha kehutanan.
- c. Program pemanfaatan hasil hutan.
- d. Program perencanaan kehutanan.
- e. Program pengawasan kawasan hutan.
- f. Program pengamanan kawasan hutan.
- g. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
- h. Program pengembangan kehutanan sosial.
- i. Program pelestarian sumber daya hutan.

4. Bidang Peternakan

- a. Program pengembangan populasi ternak sapi dan babi.
- b. Program pemberian bibit ternak kepada petani.
- c. Program sosialisasi kepada petani berkaitan akses terhadap modal.
- d. Program pengembangan kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*).
- e. Program pengembangan kawasan integrasi perternakan - perkebunan (karet, ubi dan kelapa sawit).
- f. Program pengembangan kawasan integrasi perternakan - perikanan
- g. Program peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak, sesuai dengan UU penyuluhan, sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- h. Program pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan lokal.

5. Bidang Perikanan

- a. Program pengembangan sumberdaya perikanan melalui penyelenggaraan PNPM KP bagi pelaku usaha Masyarakat Perikanan.
- b. Program peningkatan kemampuan nelayan dalam pemanfaatan teknologi.
- c. Program pembangunan Keramba Apung dan Keramba Tancap.
- d. Program pembangunan kolam/tambak.
- e. Program pengadaan benih ikan air tawar.
- f. Program pembangunan Usaha Perikanan Rakyat.
- g. Program sosialisasi kepada nelayan berkaitan akses terhadap modal.
- h. Program pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar.
- i. Program pengembangan industri pengolahan perikanan
- j. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudidaya ikan.
- k. Program peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah
- l. Program peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.

- m. Program penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
- b. Program pembinaan dan pengawasan bidang minyak dan gas (MIGAS).
- c. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
- d. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
- e. Program pengembangan geologi dan sumber daya mineral.

7. Bidang Air Bersih

- a. Program peningkatan pelanggan PDAM.
- b. Program restrukturisasi PDAM.
- c. Program peningkatan kapasitas pelayanan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di Kabupaten Landak.
- d. Program pembangunan sarana air minum di Kec. Mandor, Kec. Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti, Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec. Jelimpo.
- e. Program penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan.

7.4. Misi Keempat yaitu Mewujudkan pembangunan prasarana wilayah.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang:

1. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program pembangunan jaringan jalan primer dan sekunder, yang menghubungkan semua desa dan kecamatan.
- b. Program pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antar Kabupaten dan Provinsi: Pal 20-Sei. Ambawang, Jl. Meranti Bentiang, Jl/ Serimbu Muara Ilai, Jl. Serimbu Entikong.
- c. Program pembangunan jaringan rel kereta api Sosok-Ngabang-Sei. Pinyuh bersertasarana dan prasarananya.
- d. Program pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan yang sudah dibangun di wilayah Kabupaten Landak.
- e. Program pembukaan jalan-jalan baru pada wilayah yang masih terisolir karena belum dibangunnya Program jalan dan jembatan.
- f. fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan melalui proyek-proyek PNPM dan proyek-proyek sah lainnya pada wilayah-wilayah yang terisolir.
- g. Pembangunan sarana irigasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Landak.

2. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

- a. Program fasilitasi perkembangan sarana transportasi umum yang menghubungkan desa dengan kota kecamatan dan kota kabupaten.
- b. Program revitalisasi sarana dan prasarana angkutan sungai untuk menunjang wisata alam.
- c. Pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Ngabang.
- d. Pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke; Mandor dan Ai Besar.
- e. Program pembangunan jembatan timbang.
- f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.
- g. Program pembangunan menara telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan surat keputusan bupati.

7.5. Misi kelima yaitu Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan budaya.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang:

1. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program pengimplemantasian Rencana Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detil tataruang kabupaten untuk diusulkan sebagai rencana revisi tataruang.
- b. Program pengupayaan alih fungsi areal eks-pertambangan emas di wilayah Mandor dan sekitarnya menjadi kawasan industri (industrial estate) yang ramah lingkungan.
- c. Program penggalakan hutan tanaman rakyat untuk setiap desa minimal 10 Ha., dengan menanam tanaman keras sebagai upaya melestarikan keanekaragaman hayati, reboisasi dan perubahan iklim.
- d. Program penetapan kawasan-kawasan pertambangan rakyat dengan mempertimbangan keseimbangan ekosistem.
- e. Program penanggulangan bencana.
- f. Program Reboisasi daerah resapan air dan hutan lindung.
- g. Program pengelolaan limbah (rumah sakit, kawasan industri, dll).
- h. Program pngelolaan hutan lindung.
- i. Program penentuan kawasan suaka alam dan pelestarian cagar budaya.
- j. Program pemeliharaan kawasan DAS.
- k. Program pembuatan ruang terbuka hijau.

2. Bidang Kebersihan Kota

- a. Program penanganan kebersihan kota.
- b. Program pengolahan sampah (TPS/TPA) di Seluruh Kecamatan.
- c. Program pemeliharaan ruang terbuka hijau.

d. Program penyediaan tanah wakaf.

3. Bidang Budaya

- a. Program pengembangan nilai budaya.
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya.
- c. Program pengelolaan keragaman budaya.
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

7.6. Misi Keenam yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

Program pembangunan yang akan dilakukan meliputi urusan bidang:

1. Bidang Aparatur Pemerintah Daerah

- a. Program penataan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, jujur, bertanggung jawab, berintegritas dan akuntabel.
- b. Program reformasi birokrasi melalui efektifitas dan efisiensi SOPD dan SKPD Kabupaten Landak, perbaikan prosedur kepegawaian berdasarkan merit system mulai dari perencanaan sampai pension dan peningkatkan kapasitas, profesionalisme dan system pembinaan kepegawaian berbasis penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang adil.
- c. Program repositioning aparatur sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme.
- d. Program pembinaan mentalitas pegawai yang bersih dan bebas KKN.
- e. Program penciptaan kinerja pegawai yang prorakyat.
- f. Program peningkatan belanja modal pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.
- g. Program peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- h. Program perumusan sistem penilaian kinerja aparatur sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan karier.
- i. Program penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi serta pendistribusian yang merata sesuai dengan kebutuhan khususnya tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.
- j. Program penerapan sistem disiplin PNS sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 secara ketat, obyektif dan transparan.
- k. Program peningkatan sarana dan prasarana sebagai alat kerja aparatur.

2. Bidang Pelayanan Publik

- a. Program pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap proses pelayanan publik.
- b. Program memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan.
- c. Program pembangunan sistem perizinan satu atap secara efisien, efektif dan transparan.

- d. Program pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik.
- e. Program layanan khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah Program pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap proses pelayanan publik.
- f. Program memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan.
- g. Program pembangunan sistem perizinan satu atap secara efisien, efektif dan transparan.
- h. Program pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik.
- i. Program layanan khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah.

3. Bidang Hukum

- a. Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Program legislasi peraturan perundangan-undangan daerah.

4. Bidang Politik

- a. Program penyuksesan pemilukada provinsi tahun 2012.
- b. Program penyuksesan pemilukada Kabupaten Landak Tahun 2016.
- c. Program pembinaan peran perempuan dalam politik.
- d. Program pembinaan kaum muda tentang wawasan kebangsaan.
- e. Program pembinaan partai-partai politik.
- f. Program pendidikan politik rakyat.

5. Bidang Keamanan

- a. Program peningkatan keamanan untuk memberikan rasa aman. bagi tumbuhnya iklim investasi di Kabupaten Landak.
- b. Program pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c. Program pembinaan peran perempuan dalam politik.
- d. Program pembinaan kaum muda tentang wawasan kebangsaan.
- e. Program pembinaan partai-partai politik.
- f. Program pendidikan politik rakyat.

6. Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan

- a. Program bantuan untuk panti asuhan.
- b. Program penanganan orang gila.
- c. Program pembinaan ekonomi produktif kepada PSK.
- d. Program penetapan Upah Minimum kabupaten.
- e. Program pengadaan balai latihan kerja.
- f. Program pembinaan Napi.

7. Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Program pemetaan daerah rawan bencana.
- b. Fasilitasi tim verifikasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- c. Program pengadaan logistik untuk korban banjir, puting beliung, longsor, kebakaran dll.
- d. Program koordinasi dan mobilisasi penanggulangan bencana dengan dinas terkait.

8. Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Landak

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran, tujuan dan isu strategis RPJMD tahun 2012-2016. Program yang disajikan merupakan program prioritas. Artinya, program baik wajib maupun pilihan yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan visi dan misi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Dalam perumusan program prioritas ini mengandung indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, target-target yang harus dicapai pertahun, target pada masa akhir perencanaan dan kebutuhan pendanaan dan SKPD yang bertanggungjawab langsung dari setiap program prioritas.

Adapun indikasi rencana program prioritas dan kebutuhannya dapat dilihat pada **Tabel 8.1**. berikut ini :

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kabupaten Landak. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

Penetapan indikator kinerja daerah sesuai dengan data yang digunakan pada Lampiran I Peraturan Menteri No. 54 Tahun 2010. Secara rinci Penetapan Indikator Kinerja Daerah dapat dilihat pada **Tabel 9.1.** berikut ini:

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Landak untuk masa bakti 2012-2016, dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Berikut adalah rancangan program transisi untuk Tahun 2015-2016.

Tabel 10.1.
Rancangan Program Transisi

No	Program Utama	Sasaran	Indikator
1	Program Pengembangan Pendidikan	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan menengah dan tinggi 2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional	1. Angka partisipasi sekolah 2. Angka kelulusan 3. Angka melek huruf
2	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan 2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan	1. Angka kematian bayi 2. Angka kematian ibu 3. Angka harapan hidup 4. Angka kecukupan 5. Persentase balita bergizi buruk
4	Program Pembangunan Pertanian	1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya pendapatan petani 3. Terwujudnya swasembada pangan dan lumbung pangan 4. Meningkatnya ekspor pertanian	1. Tingkat produktivitas pertanian 2. Pendapatan petani 3. Cadangan Pangan 4. Nilai ekspor hasil pertanian
5	Program Pembangunan Sumberdaya Energi	1. Meningkatnya ketersediaan energi 2. Meningkatnya pendapatan daerah 3. Terjaganya lumbung energi nasional 4. Meningkatnya penerimaan ekspor	1. Jumlah pasokan energi 2. Jumlah desa mandiri energi 3. Pendapatan daerah 4. Nilai ekspor
6	Pembangunan Industri Pengolahan	1. Meningkatnya produktivitas industri manufaktur 2. Meningkatnya pendapatan pekerja dan pengusaha 3. Meningkatnya ekspor hasil industri pengolahan 4. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Tingkat Produktivitas industri pengolahan 2. Pendapatan pekerja 3. Penerimaan pengusaha 4. Nilai ekspor hasil industri pengeolahan 5. Pendapatan daerah
7	Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan	1. Berkurangnya angka kemiskinan 2. Berkurangnya daerah tertinggal	1. Jumlah dan persentase penduduk miskin 2. Jumlah daerah tertinggal
8	Program Kerjasama Ekonom, dan Kelembagaan	1. Meningkatkan daya saing daerah 2. Meningkatnya daya trik daerah 3. Meningkatkan Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) 4. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Nilai investasi PMDN 2. Nilai Investasi PMA 3. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMDN 4. Jumlah tenaga kerja dari investasi PMA
9	Program Pembangunan Pemerintahan	1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatnya mutu layanan publik 3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Tingkat kecepatan layanan 2. Tingkat ketepatan layanan 3. Tingkat kepuasan

Sumber : Analisis 2010

10.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Landak dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Landak setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Landak Tahun 2012-2016, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Landak dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
- b. dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Landak dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Landak;
- c. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Landak Tahun 2012-2016 dengan sebaik-baiknya;
- d. setiap SKPD, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Landak Tahun 2012-2016;
- e. setiap SKPD Kabupaten agar mengacu pada RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 dengan sebaik-baiknya;
- f. penjabaran lebih lanjut RPJM Landak Tahun 2012-2016 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Landak;
- g. penyusunan RKPD Kabupaten Landak harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten;
- h. RKPD Kabupaten Landak harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- i. dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Landak merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- j. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- k. dalam pelaksanaan RPJMD Landak Tahun 2012-2016, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Landak Tahun 2006-2010 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Landak, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;
- l. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 sebagai berikut:
 1. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Landak menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Landak menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 5. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- m. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Landak dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Landak untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Landak, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2015 menjadi pendorong membangun gerakan bersama menuju “**Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas Dan Berdaya Saing**”.

Cita-cita luhur dari visi Kabupaten Landak 2012-2016 ini menjadi total ukur dari semua kinerja pemerintah dan masyarakat yang ingin dicapai selama lima tahun. Visi ini diharapkan juga menjadi sebuah daya ungkit untuk mendorong sebuah gerakan bersama menuju perubahan yang lebih baik ke depan sebagaimana yang dicita-citakan dalam visi Kabupaten Landak 2012-2016.

RPJMD 2012-2016 memuat visi, misi, sasaran, tujuan, arah kebijakan, program-program pembangunan, program-program prioritas, kebutuhan pendanaan, indikator kinerja, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. RPJMD yang disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menjadi acuan penting dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Landak Tahun 2012-2016. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 ditentukan oleh dukungan penuh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Landak, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT